RENCANA STRATEGIS
2024 - 2026

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung





Tanjungpandan, 11 April 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **i**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 4

1.3. Maksud dan Tujuan 11

1.4. Sistematika Penulisan 12

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH **14**

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 14

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 22

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 28

2.4. Kelompok Sasaran Layanan 48

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 53

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **55**

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 55

3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026 57

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi 58

3.4. Telaahan RTRW Tahun 2014 - 2034 68

3.5. Isu Strategis 69

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN **70**

4.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah 70

4.2. *Cascading* Kinerja Perangkat Daerah 71

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **72**

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN **74**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **83**

BAB VIII PENUTUP **89**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan program pembangunan. Maka dari itu dalam rangka memelihara kesinambungan dan keselarasan proses pembangunan serta melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung berakhir pada tahun 2023, hal tersebut berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Kabupaten Belitung periode 2018-2023. Sehingga berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

Dalam penyusunannya Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung melewati berbagai tahapan seperti persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan Renstra, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

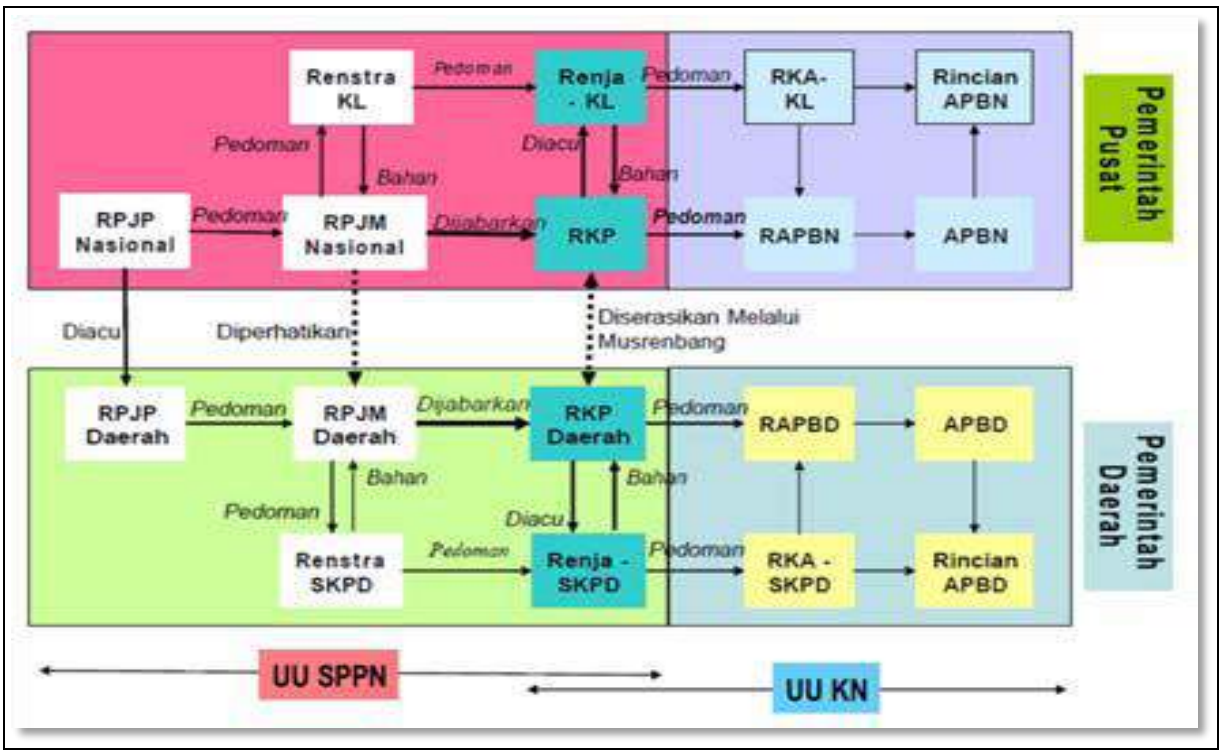
Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung juga memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan di tingkat pusat maupun provinsi dan memperhatikan renstra Kementerian terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung yang merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Selain itu, Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dilaksanakan melalui pendekatan proses perencanaan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) secara teknokratik dan partisipatif, serta menerapkan prinsip perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS), untuk mewujudkan Renstra sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah, maka Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara pencapaian sasaran strategis daerah periode 2024-2026.

Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Proses penyusunan Rancangan Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rancangan RPD. Dalam hal ini Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung disusun untuk digunakan pada masa transisi

perencanaan selama 3 tahun dengan mempertimbangkan RPD sebagai salah satu bagian komponen perencanaan di atasnya.

Hubungan antar dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah sebagaimana digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1.1 Hubungan Dokumen Renstra SKPD dengan Dokumen lain

Rencana strategis perangkat daerah dirumuskan ke dalam rancangan kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD yang memuat Program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar penyusunan atau Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung 2024- 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tetang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
12. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
13. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);

17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
18. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
19. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
20. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
22. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
27. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1236);
32. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 515);
33. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 – 2024;

34. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

35. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

37. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenkelatur perencanaan pembangunan dan keuangan

daerah;

41. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

42. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 seri E);

43. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 seri E);

44. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 seri E);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 47);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung tahun 2019 Nomor: 3 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 54);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);

52. Peraturan Bupati Belitung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung;

53. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung 2024-2026 adalah untuk:

a. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 menjadi tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.
b. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
c. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di daerah.
d. Mewujudkan pelayanan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkualitas.
e. Mendorong terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung adalah:

a. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.
b. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.
c. Meningkatkan kualitas pelayanan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini memuat tugas, fungsi, dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran layanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini memuat permasalahan pelayanan perangkat daerah, telaahan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026, telaahan renstra K/L dan renstra perangkat daerah provinsi, telaahan RTRW tahun 2014 – 2034, isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam bab ini memuat tujuan dan sasaran rencana strategis perangkat daerah, cascading kinerja perangkat daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung periode 2024- 2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung.

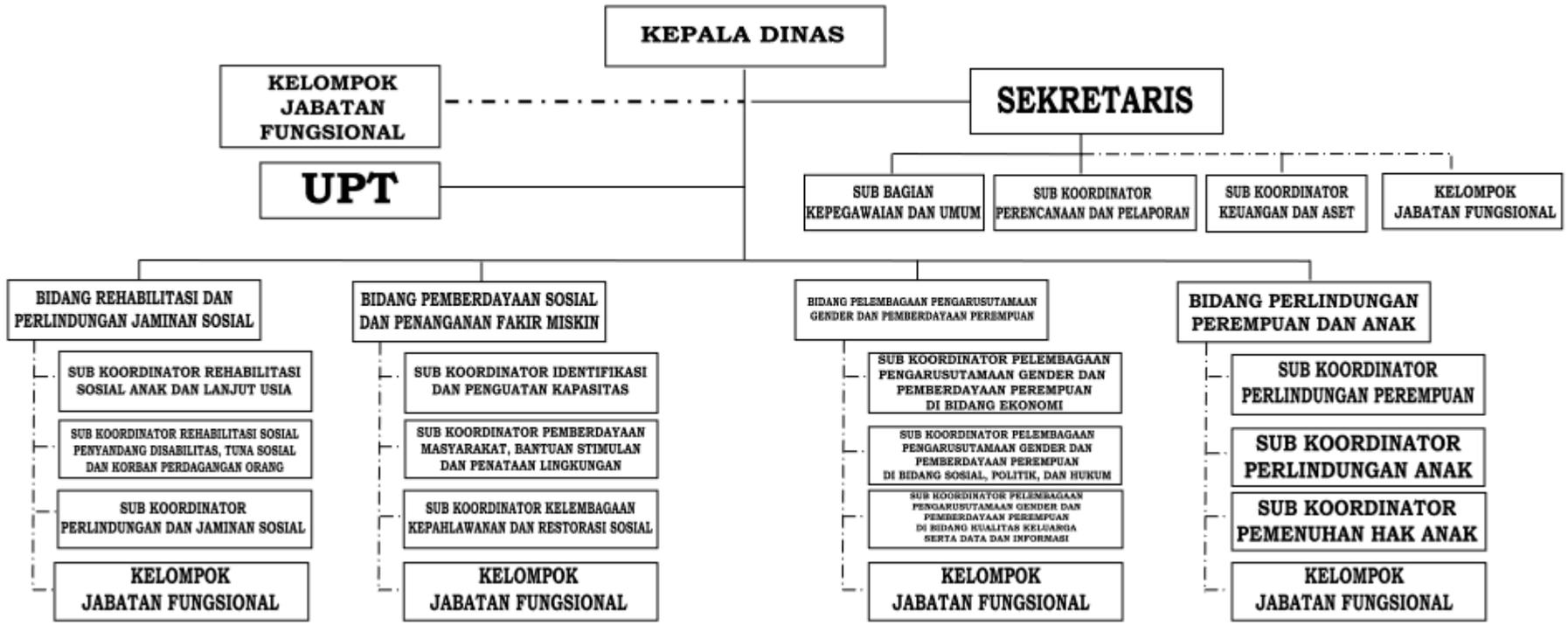
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi wajib pelayanan dasar urusan sosial dan fungsi wajib non pelayanan dasar urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas dan fungsi organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pelayanan Umum dalam lingkup sosial, pemberdayaan peremouan dan perlindungan anak;
3. Pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Penyusunan program kerja dan anggaran, pengelolaan administrasi ASN, urusan rumah tangga, dan tata usaha; dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:


KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
UPT
SEKRETARIS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PELAPORAN
SUB KOORDINATOR KEUANGAN DAN ASET
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL
SUB KOORDINATOR REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA
SUB KOORDINATOR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS, TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
SUB KOORDINATOR PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN
SUB KOORDINATOR IDENTIFIKASI DAN PENGUATAN KAPASITAS
SUB KOORDINATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, BANTUAN STIMULAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN
SUB KOORDINATOR KELEMBAGAAN KEPAHLAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
SUB KOORDINATOR PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BIDANG EKONOMI
SUB KOORDINATOR PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BIDANG SOSIAL, POLITIK, DAN HUKUM
SUB KOORDINATOR PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BIDANG KUALITAS KELUARGA SERTA DATA DAN INFORMASI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
SUB KOORDINATOR PERLINDUNGAN PEREMPUAN
SUB KOORDINATOR PERLINDUNGAN ANAK
SUB KOORDINATOR PEMENUHAN HAK ANAK
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung sebagai berikut:

Susunan organisasi Dinas terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
   2.1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   2.2. Sub Koordinator Perencanaan dan pelaporan
   2.3. Sub Koordinator Keuangan dan Aset
   2.4. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, terdiri dari:
   3.1. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
   3.2. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
   3.3. Sub Koordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial
   3.4. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
   4.1. Sub Koordinator Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
   4.2. Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan
   4.3. Sub Koordinator Kelembagaan Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
   4.4. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
   5.1. Sub Koordinator PUGPP di Bidang Ekonomi
   5.2. Sub Koordinator PUGPP di Bidang Sosial, Politik dan Hukum
   5.3. Sub Koordinator PUGPP di Bidang Kualitas Keluarga serta Data dan Informasi
   5.4. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
   6.1. Sub Koordinator Perlindungan Perempuan
   6.2. Sub Koordiantor Perlindungan Anak
   6.3. Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak
   6.4. Kelompok Jabatan Fungsional
7. UPT
8. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, serta pemberdayaan

sosial dan penanganan fakir miskin dan bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan;
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan barang milik daerah/negara;
d. pengelolaan urusan ASN;
e. pengoordinasian dan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial/pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial korban bencana alam, bencana sosial, bencana lainnya serta pelaksanaan jaminan kesejahteraan sosial.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak;
b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial

penyandang disabilitas;

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tunasosial dan korban perdagangan orang;
d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia;
e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
g. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepadapemerintah daerah provinsi;
h. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
i. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial;
j. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis, administrasi, koordinasi dan pembinaan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, dan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan

sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;

d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pedesaan;

e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;

f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil;

g. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan Daerah.

h. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan

j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyusunan kebijakan, penyelenggaraan program, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga.

Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan pelaksanaan

b. pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;

b. pelaksanaan fasilitasi pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta organisasi perempuan dan partisipasi masyarakat;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;

d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyiapkan perumusan kebijakan, penyelenggaraan program, mengoordinasikan, memfasilitasi, mensosialisasikan, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pada bidang perlindungan perempuan dan anak.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak;

b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak;

c. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyusunan serta penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak;

d. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perempuan dan anak;
e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan anak;
g. pelaksanaan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
h. pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan, pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan anak;
i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung pada **April 2023**, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 29 pegawai, yang terdiri dari 12 pegawai laki-laki (41,38%) dan 17 pegawai perempuan (58,62%). Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2, S1 dan D3, dengan jumlah total sebanyak 24 orang (82,76%), lulusan SMA sebanyak 5 orang (17,24%). Sedangkan Jumlah Non ASN Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 13 orang, terdiri dari 9 orang laki-laki (69,23%) dan 4 orang perempuan (30,77%).

Jumlah dan komposisi pegawai pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023

No	Unit Kerja	Jumlah		Ket
		Lk	Pr	
1.	Kepala Dinas	1	-	
2.	Sekretaris	1	-	
	1. Subbag Kepegawaian dan Umum	-	1	
	3. Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan	-	-	Belum ada
	4. Sub Koordinator Keuangan dan Aset	1	-	
	5. Fungsional Arsiparis	-	-	Belum ada
	6. Fungsional Pranata Komputer	1	1	
	7. Fungsional Umum	1	2	
	8. Fungsional Pekerja Sosial	-	1	
	9. Non ASN	4	1	
3.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	1	-	
	1. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	-	-	Belum ada
	2. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	1	-	
	3. Sub Koordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	1	
	4. Fungsional Pekerja Sosial Pertama	-	1	
	5. Fungsional Penyuluh Sosial Pertama	-	-	Belum ada
	6. Fungsional Umum	2	1	
	7. Non ASN	3	1	
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	-	1	
	1. Sub Koordinator Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	1	-	
	2. Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Stimulan dan Penataan lingkungan	-	-	Belum ada
	3. Sub Koordinator Kelembagaan kepahlawanan dan Restorasi Sosial	1	-	
	4. Fungsional Pekerja Sosial 5. Fungsional Umum	- 1	1 1	
	6. Non ASN	1	1	
5.	Kepala Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	-	1	
	1. Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi	-	-	Belum ada
	2. Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang Sosial, politik dan hokum	-	1	
	3. Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang kualitas keluarga data dan informasi	-	1	
	4. Non ASN	1	1	
6.	Kepala Bidang Perlindungan perempuan dan Anak	-	1	
	1. Sub Koordinator Perlindungan perempuan	-	1	
	2. Sub Koordinator Perlindungan Anak	-	1	
	3. Sub Koordinator pemenuhan Hak Anak	-	-	Belum ada
	4. Non ASN	-	-	Belum ada
Jumlah		**21**	**21**	

Tabel 2.2 Jumlah SDM Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2023

Rincian	Jumlah PNS		Jumlah CPNS		Jumlah Total
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
Gol. IV	3	2		-	5
Gol. III	9	14		-	23
Gol. II	-	1		-	1
Gol. I	-			-	-

Tabel 2.3 Rincian SDM Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Terakhir Tahun 2023

Golongan PNS/CPNS	Pendidikan Terakhir												
	S 3		S 2		S 1	S1	D IV	DIV	D III	DIII	SMA	SMA	
	LK	Pr	LK	Pr	LK	Pr	LK	Pr	LK	Pr	LK	Pr	LK
PNS Gol. IV	-	-	1	-	2	2			-	-	-	-	-
PNS Gol. III	-		-	1	6	5	2	-	-	4	2	3	-
PNS Gol. II	-		-		-	-		-	-	1	-	-	-
PNS Gol. I	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. IV	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. III	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. II	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. I	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-		**1**	**1**	**8**	**7**	**2**	-	-	**5**	**2**	**3**	-

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai ASN Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 Yang Telah Mengikuti Diklat

No	Jenis Diklat	Jumlah Pegawai	Yang telah mengikuti dan lulus	Yang belum mengikuti
1	Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK. II	1	-	1
2	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	4	3	1
3	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	11	4	7
4	Diklat Fungsional	28	14	14
5	Diklat Barang dan Jasa	27	11	16

2.2.2. Sumber Daya Aset/Modal

Sarana dan prasarana aparatur diperlukan untuk mendukung operasional dan pelaksanaan tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung. Sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan sarana pendukung untuk pelaksanaan pencapaian tugas dan fungsi dalam mencapai kinerja perangkat daerah. Berikut data sarana dan prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Sampai dengan Tahun 2023

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah yang ada	Jumlah Ideal	Kurang/ Cukup	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Berat	Ket.
1	**Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa - Tanah Bangunan Kantor Pemerintah**	Unit	4	4	**Cukup**	4	-	-	
2	Kendaraan Dinas Bermotor – Mobil	Unit	5	6	**Kurang**	4	1		
3	Kendaraan Bermotor Beroda Dua - Sepeda Motor	Unit	12	15	**Kurang**	10	1	1	
4	Alat Ukur Universal - Global Postioning System	Unit	-	-	-	-	-	-	TIDAK ADA
5	Universal Tester – Scanner	Unit	-	-	-	-	-	-	TIDAK ADA
6	Alat Ukur Lainnya - lain-lain	Unit	-	-	-	-	-	-	TIDAK ADA
7	Mesin Tik - Mesin Ketik	Unit	2	-	-	-	-	2	-
8	Mesin Hitung/Jumlah - Mesin Calculator	Unit	-	-	-	-	-	-	-
9	**Mesin Fotocopy Folio**	Unit	-	-	-	-	-	-	-
10	Alat Penyimpanan Perlengkapan Ktr - Rak Kayu	Unit	6	-	-	-	-	6	-
11	Alat Penyimpanan Perlengkapan Ktr - Filling Besi/Metal	Unit	62	-	-	43	-	19	-
12	Alat Penyimpanan Perlengkapan Ktr - Filling Kayu	Unit	-	-	-	-	-	-	-
13	Alat Penyimpanan Perlengkapan Ktr - Lemari Kaca/Plastik	Unit	7	-	-	7	-	-	-
14	Alat Kantor Lainnyan - Alat Penghancur Kertas	Unit	-	-	-	-	-	-	-
15	Mesin Absensi	Unit	1	2	kurang	1	-	-	-
16	Alat Kantor Lainnyan - Papan Pengumuman	Unit	2	-	cukup	1	1	--	-
17	Alat Kantor Lainnya (Mesin Faxmili)	Unit	2	-	cukup	1	-	1	-
18	CCTV -Camera Control Television System	Unit	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
19	Alat Kantor Lainnya - White Board	Unit	8	-	cukup	4	-	4	
20	Alat Kantor Lainnya – Peta	Unit	-	-	-	-	-	-	
21	Alat Kantor Lainnya - Overhead Projector	Unit	3	-	cukup	2	-	1	
22	Papan Gambar	Unit	-	-	-	-	-	-	
23	Alat Kantor Lainnya - Lain-lain	Unit	-	-	-	-	-	-	
24	Lemari Besi / Metal	Unit	3	-	-	-		3	
25	Meubelair - Lemari Kayu	Unit	14	-	-	10	-	4	
26	Rak Besi	Unit	8	-	-	8	-	-	
27	Meubelair - Meja Kayu/Rotan	Unit	15	-	-	15	-	-	
28	Meubelair - Meja Rapat	Unit	11	-	-	9	2	-	
29	Meubelair - Meja Resepsionis	Unit	-	-	-	-	-	-	-
30	Meubelair - Meja Tambahan	Unit	-	-	-	-	-	-	-
31	Meubilair - Meja Panjang	Unit	-	-	-	-	-	-	-
32	Meubilair - Meja Bundar	Unit	-	-	-	-	-	-	-
33	Meubelair - Kursi Rapat	Unit	20	-	-	12	8	-	-
34	Meubelair - Kursi Tamu	Unit	7	-	-	3	-	4	-
35	Meubelair - Kursi Putar	Unit	43	-	-	3	-	40	-
36	Meubelair – Kursi Biasa	Unit	42	-	-	12	-	30	-

37	Meubelair - Bangku Tunggu	Unit	4	-	-	2	-	2	-
38	Meubelair - Kursi Lipat	Unit	67	-	-	50	-	17	-
39	Meubelair - Meja Komputer	Unit	10	-	-	4	-	6	-
40	Meubelair – Tikar	Unit	-	-	-	-	-	-	-
41	Meubelair - Meja 1/2 Biro	Unit	63	-	-	45	5	13	-
42	Meubelair – Sofa	Unit	-	-	-	-	-	-	-
43	Alat Pengukur Waktu - Jam Elektronik	Unit	5	-	-	2	-	3	-
44	Alat Pembersih - Mesin Penghisap Debu	Unit	-	-	-		-	-	-
45	Alat Pembersih - Mesin Potong Rumput	Unit	2	-	-	1	-	1	-
46	Alat Pendingin - AC Window	Unit	-	-	-	-	-	-	-
47	Alat Pendingin - AC Split	Unit	8	-	-	3	1	4	-
48	Alat Pendingin - Kipas Angin	Unit	19	-	-	6	-	13	-
49	Alat Pendingin - Exhause Fan	Unit	-	-	-	-	-	-	-
50	Rak Piring Alumunium	Unit	-	-	-	-	-	-	-
51	Alat Dapur lainnya	Unit	-	-	-	-	-	-	-
52	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) – Televisi	Unit	1	-	-	-	-	1	-
53	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) – Loudspeaker	Unit	-	-	-	-	-	-	-
54	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Sound System	Unit	4	-	-	3	-	1	-
55	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) – Wireless	Unit	2	-	-	-	1	1	-
56	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) – Microphone	Unit	2	-	-		2	-	-
57	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Unit Power Supply	Unit	11	-	-	-	3	8	-
58	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Camera Video	Unit	-	-	-	-	-	-	-
59	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Camera Film	Unit	2	-	-	-	-	2	-
60	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Lambang Garuda Pancasila	Unit	-	-	-	-	-	-	-
61	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Tiang Bendera	Unit	1	-	-	1	-	-	-
62	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Kaca Hias	Unit	1	-	-	1	-	-	-
63	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) – Dispenser	Unit	2	-	-	2	-	1	-
64	Alat Rumah Tangga lainnya (Home Use) - Mimbar/Podium	Unit	-	-	-	-	-	-	-
65	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Handy Cam	Unit	-	-	-	-	-	-	-
66	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Handy Cam	Unit	-	-	-	-	-	-	-
67	Vertikal Blind	Unit	-	-	-	-	-	-	-
68	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Lain-lain – Lukisan Kaligrafi	Unit	-	-	-	-	-	-	-
69	Personal Komputer - P.C.Unit	Unit	26	-	-	12	-	14	-
70	Personal Komputer – Laptop	Unit	8	-	-	3	-	5	-
71	Personal Komputer - Note Book	Unit	-	-	-	-	-	-	-
72	Peralatan Mini Komputer – Printer	Unit	-	-	-	-	-	-	-
73	Peralatan Personal Komputer – Printer	Unit	36	-	-	16	-	20	-
74	Peralatan Personal Komputer – Scanner	Unit	-	-	-	-	-	-	-
75	Peralatan Personal Komputer - Lain-lain	Unit	-	-	-	-	-	-	-
76	Peralatan Jaringan – Server	Unit	-	-	-	-	-	-	-
77	Router	Unit	-	-	-	-	-	-	-
78	Peralatan Jaringan - Lain-lain (D-Link)	Unit	1	-	-	1	-	-	-
79	Meja Kerja Pejabat - Meja Kerja Pejabat Eselon II	Unit	-	-	-	-	-	-	-
80	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Unit	-	-	-	-	-	-	-

81	Peralatan Studio Visual - Unintemuptible Power Supply (UPS)	Unit	-	-	-	-	-	-	-
82	Peralatan StudioAudio Lainnya (360VRT set)	Unit	-	-	-	-	-	-	-
83	Layar Film / Proyektor	Unit	2	-	-	1	-	1	-
84	Camera Conference	Unit	-	-	-	-	-	-	-
85	Alat Studio Vidio Lainnya (Drone)	Unit	-	-	-	-	-	-	-
86	Alat Komunikasi Telephone - Telephone (PABX)	Unit	-	-	-	-	-	-	-
87	Bangunan Gedung Kantor - Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	3	-	-	3	-	-	-
88	Bangunan Gedung Kantor - Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Unit	-	-	-	-	-	-	-
89	Bangunan Gedung Instalasi - Bangunan Gedung Instalasi Permanen	Unit	-	-	-	-	-	-	-
90	Bangunan Gedung Tempat Ibadah - Bangunan Tempat Ibadah Permanen	Unit	-	-	-	-	-	-	-
91	Bangunan Gedung Garasi/Pool - Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	2	-	-	2	-	-	-
92	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya - Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Unit	2	-	-	-	1	1	-
93	Rumah Negara Golongan II - Rumah Negara Golongan II Type B Permanen	Unit	-	-	-	-	-	-	-
94	Tugu/Tanda Batas - Batas Administrasi Kepemilikan	Unit	-	-	-	-	-	-	-
95	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air - Sumur Artetis	Unit	-	-	-	-	-	-	-
96	Air Tanah Dalam - Air Tanah Dalam Kapasitas Sedang	Unit	-	-	-	-	-	-	-
97	Jaringan Air Minum - Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	Unit	-	-	-	-	-	-	-
98	Jaringan Tranmisi - Jaringan Tranmisi Tegangan dibawah 1KVA	Unit	1	-	-	1	-	-	-
99	Jaringan Listrik - Penambahan Daya	Unit	1	-	-	1	-	-	-
100	Umum - Ilmu Pengetahuan Umum	Buku	-	-	-	-	-	-	-
101	Umum - Ilmu Perpustakaan	Buku	-	-	-	-	-	-	-
102	Umum - Lain-lain	Buku	-	-	-	-	-	-	-
103	Agama - Agama Islam	Buku	-	-	-	-	-	-	-
104	Ilmu Sosial – Ekonomi	Buku	-	-	-	-	-	-	-
105	Ilmu Sosial – Hukum	Buku	-	-	-	-	-	-	-
106	Ilmu Bahasa - Pengetahuan Bahasa Inggris	Buku	-	-	-	-	-	-	-
107	Geografi, Biografi, Sejarah – Bigrafi	Buku	-	-	-	-	-	-	-
108	Geografi, Biografi, Sejarah – Sejarah	Buku	-	-	-	-	-	-	-
109	Tablet P.C	Unit	1	-	-	1	-	-	-
110	Peta - Peta Citra Satelit	Unit	-	-	-	-	-	-	-
111	Tanda Penghargaan – Piala	Buah	-	-	-	-	-	-	-
112	Maket / Miniatur / Replikas	Unit	-	-	-	-	-	-	-
113	Mesin Photocopy	Unit	-	-	-	-	-	-	-
114	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan (DED Gedung Kantor)	Unit	3	-	-	3	-	-	-
115	Tempat Tidur Besi	Unit	1	-	-	1	-	-	
116	Kasur / Spring Bed	Unit	2	-	-	2	-	-	
117	Tangki Air / Pinguin	Unit	1	-	-	1	-	-	
118	Menara Air / Tower	M2	1	-	-	1	-	-	

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada dokumen Rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung beserta target indikator kinerjanya. Kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan tingkat ketercapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
Tahun 2019 – 2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke (%)					Realisasi Capaian Tahun Ke (%)					Rasio Pencapaian tahun ke (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase penurunan PMKS per tahun				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-5,93	4,92	-8,79	0.76	n/a	-1186	984	-1758	152	n/a
2	Persentase PMKS yang tertangani				80	80	80	80	80	83,89	94,20	97,69	98.80	n/a	104,86	117,75	122,11	123,50	n/a
3	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial						100	100	100			41,72	42,14	n/a			41,72	42,14	n/a
4	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	100					100	100	100			100	100	n/a			100	100	n/a
5	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial						100	100	100			83,01	97.25	n/a			83,01	97.25	n/a
6	Persentase Korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100					100	100	100			100	100	n/a			100	100	n/a
7	Taman Makam Pahlawan yang tertata						90	100	100			90	100	n/a			100	100	n/a
8	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan						100	100	100			100	100	n/a			100	100	n/a
9	Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah						75	75	75			73,33	78.70	n/a			97,77	104.93	n/a

10	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah						100	100	100			100	100	n/a			100	100	n/a
11	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur						100	100	100			100	100	n/a			100	100	n/a
12	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				42,62	43,91	45,11	46,35	47,00	43,07	53,11	53,02	53.02	n/a	102,53	120,95	117,53	117.53	n/a
13	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan					5,70	5,50	5,30	5,10		2,85	4,13	3.73	n/a		50	75,09	70.38	n/a
14	Persentase ARG pada belanja langsung APBD						0,5	0,5	0,5			0,35	35,75	n/a			70	100	n/a
15	Persentase layanan perlindungan perempuan						100	100	100			100	100	n/a			100	100	n/a
16	Persentase keluarga yang terlayani						-	100	100			-	100	n/a			-	100	n/a
17	Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)						25	25	25			33,33	55.8	n/a			133,2	223.20	n/a
18	Kabupaten Layak Anak (KLA)				Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	100	100	100	100	n/a
19	Prevalensi kekerasan terhadap anak					5,0	4,8	4,6	4,4		1,92	1,81	959	n/a		38,5	37,7	208.48	n/a
20	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)						Pratama	Pratama	Pratama			Pratama	Pratama	n/a			Pratama	Pratama	n/a
21	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten						100	100	100			100	100	n/a			100	100	n/a

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2019-2023					Realisasi Anggaran 2019-2023					Rasio antara realiasi dan anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	Persentase penurunan PMKS per tahun			7.511.924.333	5.325.165.297	6.952.298.346			7.136.368.241	3.573.001.064	n/a			83,72%	67.10%	n/a		
2	Persentase PMKS yang tertangani			7.511.924.333	5.325.165.297	6.952.298.346			7.136.368.241	3.573.001.064	n/a			83,72%	67.10%	n/a		
3	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial			487.712,385	3.887.579.047	327.909.035			307.212.400	2.273.292.575	n/a			62,99%	58,48%	n/a		
4	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial			644.553.400	559.157.040	514.588.560			578.843.599	473.578.624	n/a			89,81%	84.70%	n/a		
5	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial			408.210.800	426.311.650	341.561.650			402.431.275	420.185.855	n/a			98,58%	98.56%	n/a		
6	Persentase Korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana			589.319.860	445.395.900	445.395.900			537.086.356	402.359.450	n/a			91,14%	90.34%	n/a		
7	Taman Makam Pahlawan yang tertata			4.891.600	6.721.660	86.975.400			2.064.500	3.584.560	n/a			42,21%	53.33	n/a		
8	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan			4.583.884.288	4.581.393.613	4.600.184.880			4.580.684.049	4.319.635.384	n/a			99,93%	94,29%	n/a		
9	Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah			-	18.150.000	-			-	18.131.850	n/a			-	99.90%	n/a		

10	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah			513.050.000	571.320.350	457.219.921			460.870.262	562.506.116	n/a			89,84%	98.46%	n/a		
11	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			280.302.000	329.327.100	178.390.000			267.175.800	250.530.378	n/a			95,32%	76.07%	n/a		
12	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			839.384.989	679.891.705	626.781.659			455.145.270	576.253.375	n/a			66,17%	50.47%	n/a		
13	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan			839.384.989	1.141.754.930	626.781.659			455.145.270	576.253.375	n/a			66,17%	50.47%	n/a		
14	Persentase ARG pada belanja langsung APBD			284.039.940	850.033.630	457.555.075			243.508.900	324.257.269	n/a			85,73%	35.44%	n/a		
15	Persentase layanan perlindungan perempuan			511.202.709	222.633.055	126.499.164			177.144.950	191.542.025	n/a			34,65%	84.84%	n/a		
16	Persentase keluarga yang terlayani			-	27.260.825	-			-	23.228.225	n/a			-	85.21%	n/a		
17	Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)			44.142.340	41.827.420	42.727.420			34.491.420	37.225.856	n/a			78,14%	89.00%	n/a		
18	Kabupaten Layak Anak (KLA)			194.015.075	216.738.166	263.115.375			135.516.225	209.668.101	n/a			73,99%	96.74%	n/a		
19	Prevalensi kekerasan terhadap anak			194.015.075	216.738.166	263.115.375			135.516.225	209.668.101	n/a			73,99%	96.74%	n/a		
20	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)			128.231.550	190.401.171	190.891.750			78.376.100	184.599.426	n/a			61,12%	94.15%	n/a		
21	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten			65.783.525	26.336.995	72.223.625			57.140.125	25.068.675	n/a			86,86%	93.12%	n/a		

Berdasarkan tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di atas dapat diketahui bahwa :

- Indikator kinerja yang dipakai yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan juga indikator kinerja Program.
- Dari tabel di atas dapat kita lihat secara garis besar sudah mencapai target, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target.
- Terdapat beberapa indikator yang telah melebihi target pencapaian yaitu Indikator meningkatnya penanganan PMKS tahun 2021 meningkat 5,49% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan fokus penanganan PMKS juga mengarah pada pelayanan SPM urusan Sosial.
- Juga terdapat capaian indikator yang jauh dari dari target, seperti penurunan jumlah PMKS. Untuk tahun 2019, nilai minus didapatkan dari rumusan yang telah ditetapkan, artinya tahun 2019 tidak terdapat penurunan jumlah PMKS, melainkan jumlah PMKSnya bertambah, begitu juga di tahun 2021 dengan nilai capaian munus 8,79. Peningkatan jumlah PMKS ini dikarenakan bertambahnya jumlah PMKS Fakir Miskin sebagai dampak Covid-19.
- Terdapat capaian indikator negatif, yaitu indikator prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan indikator prevalensi kekerasan terhadap anak, nilai capaian ini didapatkan dari rumusan kasus kekerasan perempuan / anak dibagi per 10.000 jumlah penduduk perempuan / anak di Kabupaten Belitung. Untuk capaian 2020 dan 2021 masih di bawah target yang ditetapkan yaitu pencapaian 2,85 dari target 5,70 di tahun 2020 dan pencapaian 4,13 dari target 5,50 di tahun 2021 untuk indikator prevalensi kekerasan terhadap perempuan. Begitu juga dengan Indikator prevalensi kekerasan terhadap anak yang merupakan indikator negatif, dimana semakin kecil nilainya akan semakin baik.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau belum berhasilnya pelayanan tersebut pada umumnya yaitu masih terbatasnya anggaran yang disediakan pemerintah daerah, belum terpenuhinya SDM yang berkompeten di bidangnya, ketidakadilan gender yang masih terjadi di lingkungan masyarakat seringkali tidak dianggap sebagai suatu masalah karena kurang adanya kesadaran dan sensitifitas, dan lemahnya kualitas dan kurangnya jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai mitra kerja dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial.

Penjelasan tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diketahui bahwa :

a. Secara garis besarnya, realisasi anggaran pelayanan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di atas 80%. Terutama untuk kinerja pelayanan rutin setiap tahunnya.

b. Terdapat beberapa indikator program yang masih di bawah 80%, yaitu :

- Indikator Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial dengan realisasi anggaran di tahun 2021 62,99%. Hal ini dikarenakan uang penghargaan untuk 1 orang pahlawan/ janda pahlawan/ veteran tidak terealisasi dikarenakan meninggal dunia, dan tidak terealisasinya Beban Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rp.100.000.000,- DED Monumen H.AS. Hanandjoeddin dan Belanja perjalanan dinasnya gagal/ batal proses pemilihan calon penyedia sebab tidak memenuhi persyaratan kualifikasi pengadaan.

  Serta Terdapat Belanja ATK, Makanan dan Minuman dan Transportasi Peserta tidak direalisasikan keseluruhan, mengingat adanya PPKM pada sub kegiatan PSKS Masyaraakat dalam program ini.

- Indikator Taman Makam Pahlawan yang tertata dengan realisasi anggaran sebesar 42,21%. Hal ini dikarenakan tidak direalisasikannya Belanja Jasa Pemakamam Veteran Rp. 2.500.000 pada Taman Makam Pahlawan Ksatria Tumbang Ganti Tanjungpandan.

- Indikator persentase layanan perlindungan perempuan dengan realisasi anggarannya sebesar 4,65%. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan pelayanan kasus disesuaikan dengan kebutuahn yang tercatat dan terlaporkan. Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tercatat dan terlayani sebanyak 38 kasus yang terinput didalam Aplikasi SIMFONI PPA. Kasus tersebut ditangani oleh 6 (enam) lembaga layanan kasus yang tersedia.

- Indikator persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) dengan realisasi anggaran sebesar 78,14%. Hal ini dikarenakan Belanja Makanan dan Minuman Rapat untuk POKJA Rp. 3.469.070 tidak direalisasikan keseluruhan disebabkan ada aturan PPKM dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 6.176.900 untuk Luar Daerah tidak direalisasikan keseluruhan karena pembatasan keberangkatan akibat pandemi covid-19.

- Indikator Status Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan realisasi anggaran 61,12%. Hal ini dikarenakan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah kegiatan KLA tidak dilaksanakan karena tidak ada panggilan Rakor KLA dari Kementerian PPPA R.I, Belanja Makanan Minuman Kegiatan KLA tidak dilaksanakan karena tidak ada verifikasi Lapangan dari Tim Juri Independent yang dilaksanakan dari Kementerian PPPA R.I hanya salah satu off Line atau On Line, dan Belanja SPPD dinas luar daerah tidak direalisasikan dikarenakan PPKM.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung juga merupakan salah satu pemangku urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu Urusan Sosial. Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2022 dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.8

Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Pencapaian	Capaian Kabupaten		
		Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti skala Kabupaten / Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	2022	100	= 30 orang / 30 orang X 100% = 100	100
		Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti				
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	2022	100	= 86 orang / 86 orang x 100% = 100	100
		Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti				

3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	2022	100	= 1154 orang / 1154 orang x 100% = 100	100
		Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti				
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	2022	100	= 13 orang / 13 orang x 100% = 100%	100
		Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti				
5.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial daerah kabupaten/kota	2022	100	Bencana alam dan sosial = (16 + 2) orang / (16 + 2) orang x 100% = 100%	100
		Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota				
Nilai Rata-rata Capaian SPM Bidang Urusan Sosial						**100**

Berdasarkan tabel 2.8 di atas, capaian SPM tahun 2022 secara jumlah dapat terpenuhi 100%, namun jika dirinci pemenuhan per indikatornya, maka capaian SPM 93,60% dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.9

Capaian / Pemenuhan Indikator SPM Sosial Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2			-3	-4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM				93.60%
1 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti**				94.67%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*30*	*30*	**0**	**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**14.67%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang Terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	
		-1	**-2**	**-3**	73.33%
	1 . Layanan data dan pengaduan	30	30	**0**	**100.00%**
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	0	0	**0**	**0%**
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	**0**	**100.00%**
	4 . Penyediaan permakanan	30	30	**0**	**100.00%**
	5 . Penyediaan sandang	17	17	**0**	**100.00%**
	6 . Penyediaan alat bantu	15	15	**0**	**100.00%**
	7 . Penyediaan perbekalan kesehatan	1	1	**0**	**100.00%**
	8 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	30	30	**0**	**100.00%**
	9 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	4	4	**0**	**100.00%**
	10 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	12	12	**0**	**100.00%**
	11 . Akses ke layanan pendidikan	0	0	**0**	**0%**
	12 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	**0**	**0%**
	13 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	31	31	**0**	**100.00%**
	14 . Layanan rujukan	26	26	**0**	**100.00%**

	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	**0**	**0%**
	JUMLAH	**197**	**197**	**0**	**1100.00%**
2 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti**				97.33%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*86*	*86*	**0**	**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**17.33%**
		Jumlah yang harus dilayani -1	**Jumlah yang Terlayani -2**	**Jumlah yang belum terlayani -3**	86.67%
	1 . Layanan data dan pengaduan	86	86	**0**	**100.00%**
	2 . Penyediaan permakanan	65	65	**0**	**100.00%**
	3 . Penyediaan sandang	21	21	**0**	**100.00%**
	4 . Penyediaan alat bantu	1	1	**0**	**100.00%**
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	1	1	**0**	**100.00%**
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	1	1	**0**	**100.00%**
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	15	15	**0**	**100.00%**
	8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	2	2	**0**	**100.00%**
	9 . Akses ke layanan pendidikan	2	2	**0**	**100.00%**
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	**0**	**100.00%**
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	15	15	**0**	**100.00%**
	12 . Layanan rujukan	12	12	**0**	**100.00%**
	13 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	0	0	**0**	**0%**
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	**0**	**100.00%**

	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	**0**	**0%**
	JUMLAH	**223**	**223**	**0**	**1300.00%**
3 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti**				96.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*1,154*	*1,154*	**0**	**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**16.00%**
		Jumlah yang harus dilayani -1	**Jumlah yang Terlayani -2**	**Jumlah yang belum terlayani -3**	80.00%
	1 . Layanan data dan pengaduan	1,154	1,154	**0**	**100.00%**
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	0	0	**0**	**0%**
	3 . Penyediaan permakanan	70	70	**0**	**100.00%**
	4 . Penyediaan sandang	47	47	**0**	**100.00%**
	5 . Penyediaan alat bantu	16	16	**0**	**100.00%**
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	1	1	**0**	**100.00%**
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	997	997	**0**	**100.00%**
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	60	60	**0**	**100.00%**
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1	1	**0**	**100.00%**
	10 . Akses ke layanan pendidikan	0	0	**0**	**0%**
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	**0**	**100.00%**
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	60	60	**0**	**100.00%**
	13 . Layanan rujukan	2	2	**0**	**100.00%**
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	**0**	**0%**

	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	**0**	**100.00%**
	JUMLAH	**2,410**	**2,410**	**0**	**1200.00%**
4 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti**				92.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*13*	*13*	**0**	**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**12.00%**
		Jumlah yang harus dilayani -1	**Jumlah yang Terlayani -2**	**Jumlah yang belum terlayani -3**	60.00%
	1 . Layanan data dan pengaduan	13	13	**0**	**100.00%**
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	13	13	**0**	**100.00%**
	3 . Penyediaan permakanan	13	13	**0**	**100.00%**
	4 . Penyediaan sandang	0	0	**0**	**0%**
	5 . Penyediaan alat bantu	0	0	**0**	**0%**
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	1	1	**0**	**100.00%**
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	0	0	**0**	**0%**
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	1	1	**0**	**100.00%**
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	1	1	**0**	**100.00%**
	10 . Akses ke layanan pendidikan	0	0	**0**	**0%**
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	6	6	**0**	**100.00%**
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	**0**	**100.00%**
	13 . Layanan rujukan	4	4	**0**	**100.00%**
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	**0**	**0%**

	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	**0**	**0%**
	JUMLAH	**53**	**53**	**0**	**900.00%**
5 .	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**				88.00%
		Ya Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*18*	*18*	**0**	**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**8.00%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang Terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	
		-1	**-2**	**-3**	40.00%
	1 . Penyediaan permakanan	0	0	**0**	**0%**
	2 . Penyediaan sandang	18	18	**0**	**100.00%**
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	0	0	**0**	**0%**
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	0	0	**0**	**0%**
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	18	18	**0**	**100.00%**
	JUMLAH	**36**	**36**	**0**	**200.00%**

Berdasarkan tabel 2.9 di atas, dapat dilihat persentase capaian berdasarkan indikator SPM sosial adalah 93,60%. Hal ini dikarenakan tidak semua penerima layanan SPM menerima dan memerlukan layanan sesuai dengan 15 kriteria yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan tugasnya selama kurun waktu lima tahun sebelumnya telah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan melaksanakan urusan sebagai berikut diantaranya Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2022 mencapai 98,79%. Dalam pelaksanaan Renstra tahun 2019 – 2023 terdapat hambatan utama yaitu Data yang belum valid dan Sumber Daya Manusia yang belum mencukupi untuk bidang teknis maupun sekretariat.

Data Pelayanan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2019 – 2022, sebagai berikut:

A. Data Penanganan PMKS Tahun 2019 - 2022

Tabel 2.8. Data Penanganan PMKS pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 - 2022

PENANGANAN PMKS TAHUN 2019 - 2022
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG

No	Jenis PMKS	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Jumlah PMKS dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial (Orang)	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 Tahun (Orang)	Persentase (%)	Jumlah PMKS dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial (Orang)	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 Tahun (Orang)	Persentase (%)	Jumlah PMKS dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial (Orang)	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 Tahun (Orang)	Persentase (%)	Jumlah PMKS dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial (Orang)	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 Tahun (Orang)	Persentase (%)
1	Anak Balita Terlantar	1	1	100.00	0	0	0.00	71	71	100.00	71	71	100.00
2	Anak Terlantar	244	129	52.87	244	144	59.02	219	219	100.00	86	86	100.00
3	Anak yang berhadapan dengan Hukum	20	20	100.00	6	6	100.00	15	15	100.00	5	5	100.00
4	Anak Jalanan	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5	Anak dengan Disabilitas	43	10	23.26	43	10	23.26	37	12	32.43	37	37	100.00
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	21	21	100.00	9	9	100.00	10	10	100.00	8	8	100.00
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	1	1	100.00	6	6	100.00	15	15	100.00	50	50	100.00
8	Lanjut Usia Terlantar	1163	1084	93.21	1163	993	85.38	1163	1163	100.00	1154	1154	100.00
9	Penyandang Disabilitas (PACA)	705	134	19.01	612	125	20.42	612	295	48.20	612	435	71.08
10	Tuna Susila	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
11	Gelandangan	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
12	Pengemis	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
13	Pemulung	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
14	Kelompok Minoritas	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
15	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBLP)	n/a	n/a	-	n/a	n/a	-	n/a	n/a	-	n/a	n/a	-
16	Orang dengan HIV/AIDS	48	48	100.00	16	16	100.00	16	16	100.00	16	16	100.00
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	4	4	100.00	4	4	100.00	6	6	100.00	4	4	100.00
18	Korban Trafficking	2	2	100.00	0	0	-	0	0	-	0	0	-
19	Korban Tindak Kekerasan	44	44	100.00	28	28	100.00	40	40	100.00	32	32	100.00
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	18	18	100.00	18	18	100.00	12	12	100.00	13	13	100.00
21	Korban Bencana Alam	384	384	100.00	11	11	100.00	32	32	100.00	16	16	100.00
22	Korban Bencana Sosial	38	38	100.00	8	8	100.00	17	17	100.00	2	2	100.00
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	n/a	n/a	0.00	n/a	n/a	0.00	1096	1096	100.00	1096	1096	100.00
24	Fakin Miskin	11601	10090	86.98	11463	11463	100.00	11463	11463	100.00	11463	11463	100.00
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0	0.00	0	0	0.00	5	5	100.00	21	21	100.00
26	Komunitas Adat Terpencil	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	Jumlah	**14337**	**12028**	**83.89**	**13631**	**12841**	**94.20**	**14829**	**14487**	**97.69**	**14686**	**14509**	**98.79**

B. Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Adapun Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlibat dalam penanganan PMKS sebagai berikut :

TABEL 2.9
PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL

NO	KECAMATAN	2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	2021	2022	
						Lk	Pr
1	TANJUNGPANDAN	3	4	4	4	-	4
2	MEMBALONG						
3	SIJUK						
4	BADAU						
5	SELAT NASIK						
	JUMLAH	3	4	4	4	-	4

TABEL 2.10
PENDAMPING PROGRAM/KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

NO	KECAMATAN	2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	2021	2022
1	TANJUNGPANDAN	17	16	15	14	14
2	MEMBALONG	5	5	4	4	4
3	SIJUK	3	3	3	3	3
4	BADAU	2	2	2	2	2
5	SELAT NASIK	2	2	2	2	2
	JUMLAH	29	28	26	25	25

TABEL 2.11
PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT

NO	KECAMATAN	2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	2021	2022
1	TANJUNGPANDAN	16	16	16	16	16
2	MEMBALONG	12	12	12	12	12
3	SIJUK	10	10	10	10	10
4	BADAU	7	7	7	7	7
5	SELAT NASIK	4	4	4	4	4
	JUMLAH	49	49	49	49	49

TABEL 2.12
TARUNA SIAGA BENCANA

NO	KECAMATAN	2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	2021	2022
1	TANJUNGPANDAN		39	38	37	37
2	MEMBALONG		0	0	0	0
3	SIJUK		4	3	3	3
4	BADAU		2	1	1	1
5	SELAT NASIK		4	4	4	4
	JUMLAH		49	46	45	45

TABEL 2.13
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)

NO	KECAMATAN	2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	2021	2022
1	TANJUNGPANDAN	5	5	5	5	5
2	MEMBALONG	0	0	0	0	0
3	SIJUK	0	0	0	0	0
4	BADAU	0	0	0	0	0
5	SELAT NASIK	0	0	0	0	0
	JUMLAH	5	5	5	5	5

TABEL 2.14
KARANG TARUNA

NO	KECAMATAN	2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	2021	2022
1	TANJUNGPANDAN	18	18	18	18	18
2	MEMBALONG	13	13	13	13	13
3	SIJUK	11	11	11	11	11
4	BADAU	8	8	8	8	8
5	SELAT NASIK	5	5	5	5	5
	JUMLAH	55	55	55	55	55

TABEL 2.15
LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)

NO	KECAMATAN	2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	2021	2022	
						Lk	Pr
1	TANJUNGPANDAN	2	2	2	2	-	2
2	MEMBALONG	0	0	0	0	-	0
3	SIJUK	0	0	0	0	-	0
4	BADAU	0	0	0	0	-	0
5	SELAT NASIK	0	0	0	0	-	0
	JUMLAH	2	2	2	2	-	2

TABEL 2.16
KELUARGA PIONER

NO	KECAMATAN	2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	2021	2022
1	TANJUNGPANDAN	0	0	0	0	0
2	MEMBALONG	0	0	0	0	0
3	SIJUK	0	0	0	0	0
4	BADAU	0	0	0	0	0
5	SELAT NASIK	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0

TABEL 2.17
WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA BERBASIS MASYARAKAT(WKSBM)

NO	KECAMATAN	2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	2021	2022
1	TANJUNGPANDAN	4	4	4	4	4
2	MEMBALONG	0	0	0	0	0
3	SIJUK	0	0	0	0	0
4	BADAU	0	0	0	0	0
5	SELAT NASIK	0	0	0	0	0
	JUMLAH	4	4	4	4	4

TABEL 2.18
WANITA PEMIMPIN KESEJAHTERAAN KELUARGA

NO	KECAMATAN	2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	2021	2022
1	TANJUNGPANDAN	0	0	0	0	0
2	MEMBALONG	0	0	0	0	0
3	SIJUK	0	0	0	0	0
4	BADAU	0	0	0	0	0
5	SELAT NASIK	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0

TABEL 2.19
PENYULUH SOSIAL

NO	KECAMATAN	2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	2021	2022
1	TANJUNGPANDAN	1	1	1	0	0
2	MEMBALONG	0	0	0	0	0
3	SIJUK	0	0	0	0	0
4	BADAU	0	0	0	0	0
5	SELAT NASIK	0	0	0	0	0
	JUMLAH	1	1	1	0	0

TABEL 2.20
TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK)

NO	KECAMATAN	2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	2021	2022	
						Lk	Pr
1	TANJUNGPANDAN	1	1	1	1	1	-
2	MEMBALONG	1	1	1	1	1	-
3	SIJUK	1	1	1	1	1	-
4	BADAU	1	1	1	1	1	-
5	SELAT NASIK	1	1	1	1	1	-
	JUMLAH	5	5	5	5	5	-

TABEL 2.21
DUNIA USAHA

NO	KECAMATAN	2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	2021	2022
1	TANJUNGPANDAN	0	0	0	0	0
2	MEMBALONG	0	0	0	0	0
3	SIJUK	0	0	0	0	0
4	BADAU	0	0	0	0	0
5	SELAT NASIK	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0

Untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdapat capaian Desa Layak Anak tahun 2022, yaitu 5 Kecamatan, 3 Kelurahan, dan 19 Desa Layak Anak, sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.22 berikut :

Tabel 2.22
Jumlah Desa Layak Anak Kecamatan, Kelurahan dan Desa
Kabupaten Belitung

No.	Kecamatan / Desa	Jumlah Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan Layak Anak	Keterangan
1.	Kec. Tanjungpandan	1	1	Kec. Tanjungpandan
	Kelurahan	7	3	Kel. Pangkallalang, Kel. Parit, dan Kel. Kota
	Desa	9	5	Desa Air Merbau, Desa Air Ketekok, Desa Air Raya, Desa Dukong, Desa Pelempang Jaya.
2.	Kec. Membalong	1	1	Kec. Membalong
	Desa	1	6	Desa Simpang Rusa, Desa Kembiri, Desa Lasar, Desa Perpat, Desa Tanjung Rusa, Desa Pulau Seliu.
3.	Kecamatan Sijuk	1	1	Kecamatan Sijuk
	Desa	10	0	-
4.	Kecamatan Badau	1	1	Kecamatan Badau
	Desa	7	7	Desa Badau, Desa Cerucuk, Desa Sungai Samak, Desa Pegantungan, Desa Kacang Butor, Desa Air Batu Buding dan Desa Ibul

5.	Kec. Selat Nasik	1	1	Kec. Selat Nasik
	Desa	4	1	Desa Suak Gual
	Jumlah Kecamatan	**5**	**5**	
	Jumlah Kelurahan	**7**	**3**	
	Jumlah Desa	**42**	**19**	

2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung yang tercantum dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, maka Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi wajib urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Di dalam struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, mempunyai 4 (empat) bidang memberikan pelayanan kepada mitranya, yaitu:

2.4.1. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial/pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial korban bencana alam, bencana sosial, bencana lainnya serta pelaksanaan jaminan kesejahteraan sosial.

Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial beberapa fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada mitranya yaitu:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7. Dinas Perhubungan
8. Dinas Komunikasi dan Informatika
9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Satuan Polisi Pamong Praja
12. 5 Kecamatan (Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong dan Selat Nasik)
13. Desa/ Kelurahan
14. Baznas Kabupaten Belitung
15. BNN Kabupaten Belitung
16. Panti Hijrah Bina Laras
17. Panti Asuhan Anak/ Lansia/ Lembaga Kesejahteraan Sosial

2.4.2. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis, administrasi, koordinasi dan pembinaan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin beberapa fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada mitranya yaitu:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7. Dinas Perhubungan
8. Dinas Komunikasi dan Informatika
9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Satuan Polisi Pamong Praja

12. 5 Kecamatan (Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong dan Selat Nasik)
13. Desa/ Kelurahan
14. Baznas Kabupaten Belitung
15. BNN Kabupaten Belitung
16. Panti Hijrah Bina Laras
17. Panti Asuhan Anak/ Lansia/ Lembaga Kesejahteraan Sosial
18. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

2.4.3. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyusunan kebijakan, penyelenggaraan program, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga.

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan beberapa fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada mitranya yaitu:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
8. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11. Dinas Kesehatan
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Komunikasi dan Informatika

15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17. Dinas Lingkungan Hidup
18. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
20. Dinas Perikanan
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22. Dinas Pariwisata
23. Dinas Pemuda dan Olah Raga
24. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja
25. Satuan Polisi Pamong Praja
26. 5 Kecamatan (Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong dan Selat Nasik)
27. Desa/ Kelurahan
28. Baznas Kabupaten Belitung
29. BNN Kabupaten Belitung
30. PKK Kabupaten Belitung
31. Organisasi Wanita Kabupaten Belitung
32. Lembaga Adat Melayu Belitung
33. Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Belitung
34. Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Seroja Belitung
35. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

2.4.4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyiapkan perumusan kebijakan, penyelenggaraan program, mengoordinasikan, memfasilitasi, mensosialisasikan, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pada bidang perlindungan perempuan dan anak.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak beberapa fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada mitranya yaitu:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD

3. Inspektorat
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
8. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11. Dinas Kesehatan
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Komunikasi dan Informatika
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17. Dinas Lingkungan Hidup
18. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
20. Dinas Perikanan
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22. Dinas Pariwisata
23. Dinas Pemuda dan Olah Raga
24. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja
25. Satuan Polisi Pamong Praja
26. 5 Kecamatan (Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong dan Selat Nasik)
27. Desa/ Kelurahan
28. BNN Kabupaten Belitung
29. Kejaksaan Negeri Tanjungpandan
30. Polres Belitung
31. Pengadilan Negeri Tanjungpandan
32. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung
33. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungpandan
34. Pengawas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

a. Tantangan :

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tiga tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Rendahnya kuantitas dan kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai mitra kerja dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial.
b. Tidak dapat diprediksinya penambahan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
c. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
d. Kurangnya komitmen dari pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian regulasi Kabupaten Layak Anak.
e. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
f. Jumlah perempuan sebagai kepala keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
g. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga yang masih menganggap bahwa permasalahan keluarga adalah hal yang tabu untuk diungkapkan.
h. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
i. Kurangnya SDM baik di aparatur maupun relawan terlatih dalam penanganan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, maupun dalam menangani permasalahan sosial
j. Kurangnya sarana prasarana dalam menangani pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.

b. Peluang:

Adapun Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tiga tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
b. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam Dokumen Perencanaan Daerah.
c. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak baik di kabupaten, provinsi maupun nasional.
d. Komitmen Pemerintah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
e. Partisipasi kelembagaan dan relawan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang berperan aktif dalam penanganan kasus terkait perlindungan perempuan dan anak.
f. Kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dalam pemenuhan hak anak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Belitung nomor 57 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab dalam perumusan konsep dalam penyelesaian masalah-masalah sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dimasa sekarang dan yang akan datang di daerah dengan mengacu pada RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 serta memperhatikan aspirasi, kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan pelayanan senantiasa mampu menyesuaikan dengan lingkungan internal maupun eksternal dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Permasalahan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang dihadapi dapat ditinjau dari dua urusan, yaitu fungsi wajib pelayanan dasar urusan sosial dan fungsi wajib non pelayanan dasar urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mengandung permasalahan inti sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penanganan PMKS;
   Masalah ini timbul disebabkan karena sarana prasarana pendukung kurang memadai, dan kurangnya SDM secara kuantitas dan kualitas, serta data PMKS yang belum valid **yang mengakibatkan** belum terpenuhinya kebutuhan PMKS **sehingga menyebabkan** belum optimalnya penanganan PMKS.
2. Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam pembangunan;

Masalah ini timbul karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran serta perempuan dalam pembangunan **yang mengakibatkan** keterlibatan perempuan dalam kelembagaan/ organisasi masih kurang **sehingga menyebabkan** belum optimalnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.

3. Belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak;

   Masalah ini timbul karena kepedulian masyarakat terhadap kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kurang, sarana prasarana pendukung kurang memadai, kurangnya SDM dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kurangnya sosialisasi dan informasi tentang lembaga penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kurangnya koordinasi antar lembaga pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan dampak media sosial / budaya modernisasi **yang mengakibatkan** meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak **sehingga menyebabkan** belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak.

Tabel 3.1
Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya penanganan PMKS	Belum terpenuhinya kebutuhan PMKS	1. Sarana prasarana pendukung kurang memadai 2. Kurangnya SDM secara kuantitas dan kualitas. 3. Data PMKS yang belum valid.
2	Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Keterlibatan perempuan dalam kelembagaan / organisasi masih kurang	1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran serta perempuan dalam pembangunan
3	Belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Kepedulian masyarakat terhadap kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kurang 2. Sarana prasarana pendukung kurang memadai 3. Kurangnya SDM dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

			4. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang lembaga penganan kekerasan terhadap perempuan dan anak 5. Kurangnya Koordinasi antar lembaga pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak 6. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak 7. Dampak media sosial / budaya modernisasi.

3.2 TELAAHAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024 - 2026

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 telah menetapkan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026 yang menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk pencapaian kinerja perangkat daerah.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung sesuai dengan tugas dan fungsinya berperan dalam mencapai tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026 dengan **tujuan RPD yaitu "Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi"** dengan **sasaran RPD yaitu :**

a. **"Menurunnya kemiskinan penduduk"** melalui strategi :

   - "Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja", dengan arah kebijakan "Meningkatnya pemberdayaan sosial."
   - "Mengurangi beban pengeluaran", dengan arah kebijakan "Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS", dan arah kebijakan "Meningkatkan kualitas data dan sasaran penerima program perlindungan sosial."

b. **"Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan"** melalui strategi "Memperkuat ekonomi desa dan kawasan perdesaan" dan arah kebijakan "Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender".

Terdapat faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung 2024-2026 yaitu:

a) Faktor penghambat :
   - Kurangnya Sumber Daya Manusia aparatur yang profesional dan terlatih dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial;
   - Lemahnya kualitas dan kurangnya jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) sebagai mitra kerja untuk bersama-sama menangani permasalahan kesejahteraan sosial seperti partisipasi dunia usaha, PSM, Orsos / yayasan, Karang Taruna dan lain-lain.
   - Belum mantapnya kehidupan sosial budaya masyarakat, yang disebabkan oleh belum efektifnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menfasilitasi pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.

b) Faktor Pendorong :
   - Tersedianya Aparatur yang professional.
   - Adanya kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
   - Adanya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang membantu dalam penanganan PSKS.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/ LEMBAGA DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Sosial RI

Kementerian pengampu urusan Sosial yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung adalah Kementerian Sosial RI.

Tujuan dan sasaran Strategis Kementerian Sosial RI tahun 2020 – 2024 yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan**

   Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah sebagai berikut:

   1. **Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan**

      Capaian sasaran ini diukur dengan indikator : Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)

2. **Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional**

   Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas pemberian layanan kesejahteraan sosial

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- Indeks Partisipasi Sosial;
- Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang tersertifikasi;
- Persentase (%) lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang terakreditasi;
- Persentase (%) daerah yang menyelenggarakan layanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan.

b. Meningkatnya kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator : Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dan penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan sasaran strategis Renstra Kementerian Sosial di atas, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong berdasarkan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung adalah :

Faktor Penghambat :

1. Kurang optimalnya panti rehabilitasi yang memadai;
2. Terbatasnya anggaran program perlindungan dan jaminan sosial;
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengnenai PSKS dan penanganan PMKS;
4. Kurangnya sosialisasi pada masyarakat tentang tanggap bencana;
5. Terbatasnya dana pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.

Faktor Pendorong :

1. Sinergitas antara Dinas/ Instansi terkait;
2. Tumbuhnya kemandirian PMKS dan peningkatan kekuatan sosial masyarakat;
3. Bertambahnya potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial (PSKS) bagi masyarakat;
4. Partisipasi masyarakat untuk menjadi relawan penanganan bencana;
5. Tingginya satuan KORPS dan masyarakat untuk melakukan bakti sosial.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
URUSAN SOSIAL				
1. 2. 3.	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kessejahteraan sosial. Meningkatnya kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).	• Permasalahan terkait Rehabilitasi Sosial 1. Kapasitas daya tampung panti sangat terbatas, tidak sebanding dengan jumlah PMKS yang membutuhkan rehabilitasi di panti.	• Kurang optimalnya panti rehabilitasi yang memadai.	• Sinergitas antara Dinas/ Instansi terkait.
		• Permasalahan terkait Perlindungan dan Jaminan Sosial 1. Belum ditentukannya standar kemiskinan yang sesuai dengan daerah. 2. Masih tingginya fakir miskin, sementara bantuan ekonomi produktif terbatas 3. Belum terbentuknya regulasi ijin adopsi anak.	• Terbatasnya anggaran program perlindungan dan jaminan sosial.	• Tumbuhnya kemandirian PMKS dan peningkatan Kekuatan Sosial Masyarakat.
		• Permasalahan terkait Pemberdayaan Sosial 1. Tingginya pengumpulan sumbangan yang tidak berizin. 2. Masih banyaknya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang tidak aktif. 3. Masih banyaknya potensi modal sosial masyarakat yang belum dioptimalkan dalam penanganan PMKS.	• Kurangnya pengetahuan Masyarakat mengenai PSKS dan penanganan PMKS.	• Bertambahnya potensi dan sumber-sumber kesejahteran sosial (PSKS) bagi masyarakat.
		• Permasalahan terkait Penanganan Bencana 1. Kurang validnya data korban bencana 2. Rendahnya penanganan trauma bagi korban bencana yang tidak tuntas.	• Kurangnya sosialisasi pada masyarakat tentang tanggap bencana.	• Partisipasi masyarakat untuk menjadi Relawan penanganan bencana.
		• Permasalahan terkait Taman Makam Pahlawan 1. Masih adanya Makam Pahlawan yang belum terpelihara dengan baik.	• Terbatasnya dana pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.	• Tingginya Satuan KORPS dan masyarakat untuk melakukan Bakti Sosial.

3.3.2. Telaahan Rentsra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tahun 2020 – 2024 yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. **Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak melalui Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak**

   Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah sebagai berikut:

   a. **Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak.**

      Capaian sasaran ini diukur dengan indikator :

      - Indeks Pembangunan Gender (IPG)
      - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
      - Tingkat Partisipasi Angka Kerja (TPAK) Perempuan
      - Indeks Perlindungan Anak (IPA)
      - Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KtP)
      - Prevalensi kekerasan terhadap anak (KtA)
      - Persentase (%) perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif
      - Persentase (%) daerah dengan peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak.

Berdasarkan sasaran strategis Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di atas, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong berdasarkan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung tercantum dalam tabel 3.3. berikut :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Urusan PPA				
1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan	• Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender: 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.	• Adanya pelaksanaan program sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dalam politik.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	**Pendorong**
	perlindungan khusus anak untuk mewujudkan Indonesia ramah perempuan dan layak anak.	2) Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain. 3) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. 4) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. 5) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. 6) Persentase perempuan di manejerial dan professional belum optimal.	• Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak. • Kurangnya minat perempuan untuk terlibat di politik. • Masih terdapat kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan. • Kurangnya aksesibilitas perempuan dalam peran manajerial dan professional. • Kurangnya peran dunia usaha dan lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.	• Adanya kebijakan untuk sekolah gratis. • Adanya peran perangkat daerah dan lembaga masyarakat untuk peningkatan pemberdayaan perempuan.
		• Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan: 1. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi di ranah domestik, tenaga kerja, dan tindak pidana perdagangan orang. 2. Belum optimalnya sarana dan prasarana kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak (Belum tersedianya Rumah Aman dan UPT PPA). 3. Kurang optimalnya layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 4. Belum semua Lembaga layanan perlindungan perempuan aktif dan memiliki standar pelayanan. 5. Masih ditemukannya Kasus Pidana Perdagangan Orang. 6. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak. 7. Belum adanya Tenaga SDM terlatih KtP/A. 8. Belum adanya kebijakan / regulasi terkait dengan	• Terbatasnya SDM terlatih yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Belum tersedianya Rumah Aman dan UPT PPA. • Masih belum tersosialisasikan nya peran dan fungsi PPA di masyarakat. • Masih belum tersosialisasikanny a hak-hak perempuan di bidang ketenagakerjaan.	• Adanya komitmen pemimpin daerah untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di ranah domestic maupun di public.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		perlindungan hak perempuan dan anak. 9. Belum semua korban kekerasan dalam rumah tangga, tenaga kerja maupun TPPO yang mendapat pelayanan penanganan kasus dengan optimal baik yang datang sendiri, penjangkauan maupun dalam situasi krisis.		
		• Permasalahan terkait tumbuh kembang anak: 1. Masih ada anak yang tidak memiliki akte kelahiran. 2. Belum semua Desa memiliki PAUD. 3. Tingginya angka kematian bayi dan balita. 4. Tingginya angka perkawinan dini. 5. Belum tersedianya sarana prasarana ruang publik (ruang bermain) yang termasuk standar layak anak. 6. Belum tersedianya Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang sesuai standar Layak Anak. 7. Belum tersedianya Puskesmas Ramah Anak. 8. Belum tersedianya Pusat Kreatifitas Anak yang sesuai standar layak Anak 9. Belum tersedianya sekolah yang termasuk kategori sekolah ramah anak.	• Belum optimalnya implementasi regulasi terkait dengan percepatan akte kelahiran. • Belum semua desa memiliki anggaran penyelenggaraan PAUD. • Belum optimalnya anggaran untuk meningkatkan sarana prasarana, pusat informasi, puskesmas, pusat kreatifitas dan sekolah yang termasuk standar layak anak.	• Adanya komitmen dari Pemimpin daerah untuk mewujudkan Kabupaten Belitung menuju Kabupaten Layak Anak berdasarkan 24 Hak Anak.
		• Permasalahan terkait perlindungan anak: 1. Meningkatnya jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (anak korban kekerasan, anak bermasalah hukum, anak dengan HIV/AIDS, anak korban perlakuan salah) 2. Meningkatnya jumlah pernikahan anak dibawah umur. 3. Belum tersedianya SDM pada lembaga perlindungan anak yang terlatih KHA.	• Belum tersedianya regulasi perkawinan anak. • Belum aktifnya PATBM di desa-desa dan kelurahan. • Belum adanya anggaran untuk mengadakan pelatihan KHA bagi SDM terkait perlindungan anak. • Belum adanya regulasi terhadap peredaran penyalahgunaan obat batuk dan lem oleh anak-anak.	• Adanya komitmen dari pemimpin daerah untuk menuntaskan permasalahan perkawinan anak dan penyalahgunaan obat batuk dan lem.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		• Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 1. Masih rendahnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Masih rendahnya Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA.	• Belum tersosialisasikannya peran masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. • Belum banyak peran dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	• Adanya komitmen dari Perangkat daerah dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui lembaga perlindungan perempuan dan anak.

3.3.3. Telaahan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dalam pencapaian indikator kinerja yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten.

Tujuan dan sasaran Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 – 2026 yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. **Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**

   Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah sebagai berikut:

   a. **Meningkatnya PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial.**

      Capaian sasaran ini diukur dengan indikator : Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan perlindungnan dan jaminan sosial.

   b. **Meningkatnya pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**

      Capaian sasaran ini diukur dengan indikator : Persentase PSKS yang diberdayakan dan berpartisipasi dalam penanganan PMKS.

2. **Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana**

   Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah sebagai berikut:

   a. **Meningkatnya persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial**

      Capaian sasaran ini diukur dengan indikator : Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial.

Berdasarkan sasaran strategis Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di atas, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong berdasarkan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung sebagai berikut :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	SOSIAL			
1.	Meningkatnya PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	• Belum ditentukannya standar kemiskinan yang sesuai dengan daerah. • Masih tingginya fakir miskin, sementara bantuan ekonomi produktif terbatas • Belum terbentuknya regulasi ijin adopsi anak.	• Terbatasnya anggaran program rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial.	• Tumbuhnya kemandirian PMKS dan peningkatan Kekuatan Sosial Masyarakat.
		• Kapasitas daya tampung panti sangat terbatas, tidak sebanding dengan jumlah PMKS yang membutuhkan rehabilitasi di panti.	Kurang optimalnya panti rehabilitasi yang memadai.	• Sinergitas antara Dinas/ Instansi terkait.
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Sumber dan Kesejahteraan Sosial (PSKS)	• Masih terdapatnya pengumpulan sumbangan yang tidak berizin. • Masih banyaknya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang tidak aktif. • Masih banyaknya potensi modal sosial masyarakat yang belum dioptimalkan dalam penanganan PMKS.	• Kurangnya pengetahuan Masyarakat mengenai PSKS dan penanganan PMKS.	• Bertambahnya potensi dan sumber-sumber kesejahteran sosial (PSKS) bagi masyarakat.
		• Masih banyaknya potensi modal sosial masyarakat yang belum dioptimalkan dalam penanganan PMKS.	• Terbatasnya anggaran	• Bertambahnya potensi dan sumber-sumber kesejahteran sosial (PSKS) bagi masyarakat.
		• Masih adanya Makam Pahlawan yang belum terpelihara dengan baik.	• Terbatasnya dana pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.	• Tingginya Satuan KORPS dan masyarakat untuk melakukan Bakti Sosial.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3.	Meningkatnya persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	• Kurang validnya data korban bencana • Rendahnya penanganan trauma bagi korban bencana yang tidak tuntas.	• Kurangnya sosialisasi pada masyarakat tentang tanggap bencana.	• Partisipasi masyarakat untuk menjadi Relawan penanganan bencana.

3.3.4. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah.

Adapun Tujuan dan sasaran Strategis Dinas P3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 – 2026 yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender**

   Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah sebagai berikut:

   a. **Meningkatnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik**

      Capaian sasaran ini diukur dengan indikator : Indeks Pembangunan Gender (IDG).

2. **Meningkatnya Kesejahteraan Anak**

   Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah sebagai berikut:

   a. **Meningkatnya pemenuhan hak terhadap anak**

      Capaian sasaran ini diukur dengan indikator : Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA).

   b. **Meningkatnya perlindungan khusus anak**

      Capaian sasaran ini diukur dengan indikator : Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA).

Berdasarkan sasaran strategis Renstra DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di atas, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong berdasarkan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung sebagai berikut :

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Urusan PPA			
1.	Meningkatnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik	• Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain. • Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain. • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. • Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. • Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
		• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga perlindungan perempuan dan anak

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2. 3.	Meningkatnya pemenuhan hak terhadap anak Meningkatnya perlindungan khusus anak	• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak • Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Telaahan terhadap RTRW dilakukan dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditinjau dari implikasi RTRW.

RTRW Kabupaten Belitung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Kedudukan RTRW Kabupaten adalah sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun tata ruang nasional; penyelaras bagi kebijakan penataan ruang provinsi; dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Belitung; dan sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan; dan kebijakan pemanfaatan ruang Kabupaten, lintas kecamatan, dan lintas ekosistem.

Penataan ruang wilayah Kabupaten Belitung bertujuan mewujudkan Kabupaten Belitung yang serasi dan lestari dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing berbasis sektor sektor unggulan kelautan dan perikanan, perhubungan, dan pariwisata serta sektor penunjang lainnya. Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung, dalam RTRW Kabupaten Belitung diatur

mengenai penetapan kawasan strategis kabupaten, terdiri atas kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten.

Sebagai pengimplementasian RTRW Kabupaten Belitung, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung wajib memperhatikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah agar selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung 2024 - 2026 dan sesuai peruntukannya sebagaimana diatur dalam RTRW. Hal ini bertujuan untuk pencapaian sasaran dan tujuan RPD.

Perencanaan yang dilakukan harus mengintegrasikan rencana tata ruang secara makro dengan rencana pembangunan daerah. Berdasarkan telaahan RTRW Kabupaten Belitung, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong fungsi pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung adalah:

a. Faktor Penghambat
   - Minimnya pemahaman terhadap dokumen RTRW;
   - Koordinasi lintas sektor kurang optimal;

b. Faktor Pendorong
   - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang RTRW;
   - Instrumen pengendalian dan evaluasi kebijakan kesesuaian dokumen perencanaan dengan RTRW;
   - Instrumen pengendalian dan evaluasi kebijakan kesesuaian dokumen perencanaan dengan RTRW.

3.5. ISU STRATEGIS

Dari hasil analisa permasalahan pada subbab sebelumnya, maka rumusan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

1. Belum tersedianya lembaga rehabilitasi sosial untuk pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Belitung;
2. Belum optimalnya potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
3. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tidak valid
4. Kasus kekerasan perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
5. Rendahnya kontribusi perempuan dalam pembangunan bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesejahteraan PMKS, dengan indikator Persentase penurunan PMKS per tahun.
   Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama adalah:
   a. Meningkatnya Penanganan PMKS, dengan indikator sasaran :
      - Persentase PMKS yang tertangani atau mendapatkan layanan.
2. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
   Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:
   a. Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan, dengan indikator sasaran :
      - Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE).
3. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, dengan indikator rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak.
   Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut :
   a. Meningkatnya kualitas hidup anak, dengan indikator sasaran : rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun 2024 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Rumusan	Kondisi awal	Target Kinerja Sasaran		
					2022	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS		Persentase Penurunan PMKS Per Tahun	(jumlah PMKS tahun (n-1) –jumlah PMKS tahun n/ Jumlah PMKS tahun (n-1)) x 100%	0,96	0,5	0,5	0,5
		Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani atau mendapatkan layanan	(jumlah PMKS yang tertangani atau mendapatkan layanan / jumlah PMKS) x 100%	98,79	98,79	98,81	98,83
2.	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	-	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persentase perempuan di parlemen, pegawai, pegawai senior, manajer dan pekerja profesional dan teknis dikeluarkan oleh BPS	53,42	53,43	53,44	53,45
		Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Hasil penilaian APE yang berlaku dari Kemen PPA	-	Pratama	Pratama	Madya
3.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan		Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	(Jumlah kasus tindak kekerasan perempuan dan anak / Jumlah penduduk perempuan dan anak) x 10.000	=(30+8) / (91366+ 52661) x 10.000 = 2,64	3,20	3,18	3,16
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	(Jumlah kasus tindak kekerasan perempuan dan anak / Jumlah penduduk perempuan dan anak) x 10.000	=(30+8) / (91366+ 52661) x 10.000 = 2,64	3,20	3,18	3,16

4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung sebagaimana terlampir.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024 - 2026. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Perumusan Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dilakukan untuk mewujudkan pencapaian tujuaan dan sasaaran yang telah ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut dijabarkan melalui arah kebijakan sebagai arah pelaksanaan program, kegiatan serta sub kegiatan.

Berdasarkan analisa terhadap faktor-faktor yang saling berpengaruh dari peluang dan tantangan, maka dirumuskan strategi dan kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan RPD	**Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi**				
Sasaran RPD	**Menurunnya kemiskinan penduduk**				
Tujuan	**Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS per tahun	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani atau mendapatkan layanan	Meningkatkan kualitas data dan sasaran penerima program perlindungan sosial Meningkatkan penanganan atau pelayanan PMKS	▪ Peningkatan sarana dan prasarana pendukung layanan PMKS ▪ Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM ▪ Validasi data PMKS
Sasaran RPD	**Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan**				
Tujuan	**Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Peningkatan Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran serta perempuan dalam pembangunan
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan Pelembagaan Forum Anak dan peningkatan Kabupaten Layak Anak	- Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk peduli tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak - Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk pelayanan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak - Meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak - Meningkatkan informasi mengenai peran dan fungsi kelembagaan yang menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak - Meningkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program, Kegitaan, dan Sub Kegiatan

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung tahun 2024–2026 yang disertai dengan indikator capaian yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Berikut rencana program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator program yaitu:

1. Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.

   Definisi operasional: (Jumlah dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan/jumlah dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan yang direncanakan) x 100%.

   Kegiatan yang mendukung indikator program ini adalah :

   a. *Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah; dan Definisi Operasional : jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.*
   b. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator Dokumen keuangan perangkat daerah; dan Definisi Opreasional : jumlah dokumen keuangan perangkat daerah.*

2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat daerah

   Definisi operasional: sesuai perhitungan rumusan Peraturan Kepala BKN nomor 8 tahun 2019 tentang Indeks profesionalitas ASN sesuai dengan form pengukuran indeks profesionalitas ASN.

   Kegiatan yang mendukung indikator program ini adalah :

   a. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan indikator terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah; dan*

Definisi Operasional : jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah.

3. Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah
   Definisi operasional: Rata-rata capaian pelayanan administrasi perkantoran (dilihat dari capaian kinerja fisik dari tiap sub kegiatan/ total sub kegiatan) x 100%
   Kegiatan yang mendukung indikator program ini adalah :
   a. *Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah; dan Definisi Operasional : jumlah administrasi umum perangkat daerah.*
   b. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran; dan Definisi Operasional : jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.*

4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
   Definisi operasional: Rata-rata capaian pemenuhan sarana prasarana aparatur (dilihat dari capaian kinerja fisik dari tiap sub kegiatan/ total sub kegiatan) x 100%
   Kegiatan yang mendukung indikator program ini adalah :
   a. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator jenis barang milik daerah; dan Definisi Operasional : jumlah barang milik daerah.*
   b. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator barang milik daerah dalam kondisi baik; dan Definisi Operasional : jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik.*

B. Program Pemberdayaan Sosial, dengan indikator program yaitu: Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial.
   Definisi Operasional : (Jumlah penerima program pemberdayaan sosial / Jumlah Penduduk Miskin) x 100%
   Kegiatan yang mendukung program adalah :
   1. *Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota, dengan indikator jumlah PSKS yang aktif; dan Difinisi Operasional : Jumlah PSKS aktif di tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.*

C. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, dengan indikator program yaitu: Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Daerah Asalnya.

Definisi operasional : (Jumlah warga Negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani / Jumlah warga Negara migran korban kekerasan) x 100%.

Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. *Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, dengan indikator Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal; dan Definisi Operasional : jumlah warga Negara migran tindak kekerasan yang dipulangkan ke Desa/ Kelurahan asal.*

D. Program Rehabilitasi Sosial dengan indikator program yaitu Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial.

Definisi operasional : (Jumlah penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti/Jumlah penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan pengemis diluar panti)x100%.

Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. *Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, dengan indikator Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan yang mendapatkan rehabilitasi sosial; dan Definisi Operasional : jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan yang mendapatkan rehabilitasi sosial di bagi jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar dikali 100%.*

2. *Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial, dengan indikator persentase PMKS yang menerima layanan rehabilitasi sosial; dan Definisi Operasional : Jumlah (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang dilayani dibagi jumlah PMKS lainnya yang melapor dikali 100%.*

E. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan indikator program yaitu terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial.

Definisi operasional: (Jumlah penerima perlindungan dan jaminan sosial PBI) / Jumlah jiwa dalam DTKS) x 100%.

Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. *Pemeliharaan anak-anak terlantar, dengan indikator terpenuhinya pemeliharaan anak terlantar; dan Definisi Operasional : jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhannya.*
2. *Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan indikator data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi; dan Definisi Operasional : jumlah data orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi dibagi jumlah DTKS dikali 100%.*

F. Program Penanganan Bencana dengan indikator program yaitu Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.

Definisi operasional : (Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial daerah kabupaten yang terpenuhi kebutuhan dasarnya/Populasi korban bencana alam dan sosial kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten)x100%.

Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. *Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota, dengan indikator korban bencana yang menerima bantuan permakanan; dan Definisi Operasional : jumlah korban bencana yang menerima bantuan permakanan.*
2. *Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota, dengan indikator korban bencana yang menerima bantuan sosial; dan Definisi Operasional : jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial.*

G. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan indikator program yaitu Taman Makam Pahlawan yang tertata.

Definisi operasional : Jumlah TMP yang tertata dan terkelola / jumlah TMP x 100%.

Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. *Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota, dengan indikator terlaksananya pengeloalaan Taman Makam Pahlawan; dan Definisi Operasional : jumlah TMP yang dipelihara di bagi jumlah seluruh TMP.*

H. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator program yaitu Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD.

Definisi operasional : (Jumlah ARG pada belanja langsung APBD / Jumlah belanja langsung di APBD)x100%.

Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. *Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota, dengan indikator Lembaga pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG; dan Definisi Operasional : jumlah lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan kebijakan PUG.*
2. *Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota, dengan indikator terfasilitasinya organisasi perempuan; dan Definisi Operasional : jumlah organisasi perempuan.*
3. *Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator terfasilitasinya forum Puspa Kabupaten Belitung; dan Definisi Operasional : Jumlah lembaga penyedia layanan.*

I. Program Perlindungan Perempuan dengan indikator program yaitu Persentase layanan perlindungan perempuan.

Definisi operasional : Jumlah korban kekerasan perempuan yang melapor / jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan perlindungan x 100%.

Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. *Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah/ Kabupaten, dengan indikator Terlaksananya pelayanan perlindungan perempuan dan anak; dan Definisi Operasional : jumlah layanan dibagi jumlah pengaduan dikali 100%.*
2. *Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator jumlah lembaga yang terfasilitasi; dan Definisi Operasional : jumlah lembaga yang terfasilitasi.*

J. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan indikator program yaitu Persentase keluarga yang terlayani.

Definisi operasional : Jumlah Keluarga yang melapor dan memerlukan pelayanan / jumlah keluarga yang dilayani x 100%.

Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. *Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota, dengan indikator lembaga keluarga yang dibina; dan Definisi Operasional : jumlah lembaga keluarga yang dibina.*

K. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan indikator program yaitu Persentase pemenuhan data sistem informasi gender dan anak (SIGA).

Definisi operasional : (Jumlah OPD yang melaksanakan Pendataan SIGA / Jumlah OPD yang ada) x 100%.

Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. *Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator tersedianya data gender dan anak; dan Definisi Operasional : jumlah dokumen data gender dan anak.*

L. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan indikator program yaitu Status Kabupaten Layak Anak (KLA).

Definisi Operasional : Penilaian KLA oleh Kementerian PPA RI.

Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. *Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator tercapainya peningkatan status KLA; dan Definisi Operasional : status KLA Madya.*

2. *Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator terfasilitasinya forum anak Kabupaten Belitung; dan Definisi Operasional : laporan fasilitasi Forum Anak Kabupaten Belitung.*

M. Program Perlindungan Khusus Anak dengan indikator program yaitu Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten.

Definisi operasional : Jumlah anak korban kekerasan/jumlah anak korban kekerasan yang ditangani x 100 %.

Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. *Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator tersedianya layanan perlindungan*

anak tingkat Desa/ Kelurahan; dan Definisi Operasional : jumlah layanan perlindungan anak ditingkat Desa/ Kelurahan dibagi jumlah Desa/ Kelurahan dikali 100%.

Bab ini menjelaskan tentang program dan kegiatan yang dilengkapi indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

Secara harfiah, definisi dari program adalah penjabaran kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi serta kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sementara itu, kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Kegiatan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Periode 2024-2026, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung menetapkan 13 (tiga belas) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan yang merupakan instrumen kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana *strategic* yang diarahkan untuk mencapai tujuan sasaran serta dan misi dan visi pemerintah daerah.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga

harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis pada awalnya mengalami penyesuaian yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan sebagai pedoman operasional kegiatan selanjutnya. Program dan kegiatan prioritas yang telah dievaluasi tersebut terdapat dalam Tabel 6.1 berikut:

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja, Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2024 - 2026

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa dengan memperhatikan tugas dan fungsi pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, maka indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024 - 2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Kinerja			Kondisi kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indikator Tujuan : Persentase Penurunan PMKS pertahun	0,96	0,5	0,5	0,5	0,5
2	Indikator Sasaran : Persentase penanganan PMKS yang tertangani atau mendapatkan layanan	98,79%	98,79%	98,81%	98,83%	98,83%
3	Indikator Tujuan : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	53,42	53,43	53,44	53,45	53,45
4	Indikator Sasaran : Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	-	Madya	Madya	Madya	Madya
5	Indikator Tujuan : Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	2,64	3,20	3,18	3,16	3,16
6	Indikator Sasaran : Rasio Kekerasan terhadap perempuan dan anak	2.64	3,20	3,18	3,16	3,16

7.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Dengan menggunakan indikator kinerja, suatu kinerja bisa

dievaluasi apakah telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan ataukah tidak.

Capaian indikator kinerja kunci SPM disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dan Capaian Indikator Kinerja Kunci LPPD disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

IKK Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung terdapat dalam tabel 7.2. dan 7.3 berikut :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Urusan Sosial
Tahun 2024 - 2026

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) SPM	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Kinerja			Kondisi kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Urusan Sosial					
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024 - 2026

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Kinerja			Kondisi kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Urusan Sosial					
1	IKK Outcome : Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%
1.	IKK Output : Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan
2.	IKK Output : Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	1283 orang	1283 orang	1283 orang	1283 orang	1283 orang
3.	IKK Output : Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim
4.	IKK Output : Jumlah penyandang disabilitas terlatar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	5016 orang	5016 orang	5016 orang	5016 orang	5016 orang
5.	IKK Output : Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1 Unt	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
6.	IKK Output : Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi.	105 orang	105 orang	105 orang	105 orang	105 orang
7.	IKK Output : Jumlah rumah singgah/ shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar.	1 rumah singgah	1 rumah singgah	1 rumah singgah	1 rumah singgah	1 rumah singgah
8.	IKK Output : Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang.	117 orang	105 orang	105 orang	105 orang	105 orang
9.	IKK Output : Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu.	49 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang
10.	IKK Output : Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit
11.	IKK Output : Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
12.	IKK Output : Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket

	memanfaatkan paket perbekalan kesehatan					
13.	IKK Output : Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	-	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim
14.	IKK Output : Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	123 orang	123 orang	123 orang	123 orang	123 orang
15.	IKK Output : Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan Sosial	105 orang	105 orang	105 orang	105 orang	105 orang
16.	IKK Output : Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	105 orang	105 orang	105 orang	105 orang	105 orang
17.	IKK Output : Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	9 orang	5 orang	5 orang	5 orang	15 orang
18.	IKK Output : Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	30 orang
19.	IKK Output : Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	3 Orang	4 Orang	4 Orang	5 Orang	13 Orang
20.	IKK Output : Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	121 orang	105 orang	105 orang	105 orang	105 orang
21.	IKK Output : Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk.	37 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang
2	IKK Outcome : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	100%	100%	100%
1.	IKK Output : Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	-	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang
2.	IKK Output : Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	11 orang	11 orang	11 orang	11 orang	33 orang
3.	IKK Output : Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	-	-	-	-	-
4.	IKK Output : Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok Rentan	-	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang
5.	IKK Output : Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	2 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang
6.	IKK Output : Jumlah pekerja sosial professional/ tenaga	76 orang	76 orang	76 orang	76 orang	76 orang

	Kesejahteraan sosial dan/ atau relawan sosial yang tersedia					
	URUSAN : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Indikator Outcome : Persentase ARG pada belanja operasional dan modal APBD	42,40%	42,40%	42,40%	42,40%	42,40%
1.	Indikator Output : Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	28 Lembaga	28 Lembaga	28 Lembaga	28 Lembaga	28 Lembaga
2.	Indikator Output : Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	5 Program/ Kegiatan	10 Program/ Kegiatan	15 Program/ Kegiatan	20 Program/ Kegiatan	20 Program/ Kegiatan
2	Indikator Outcome : Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	0,015%	0,015%	0,015%	0,015%	0,015%
1.	Indikator Output : Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	5 media	5 media	5 media	5 media	5 media
2.	Indikator Output : Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga
3.	Indikator Output : Persentase korban kekerasan anak yang Terlayani	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Indikator Output : Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	10 Lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga
5.	Indikator Output : Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	10 Lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga
3	Indikator Outcome : Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	32,83	32,82	32,81	32,80	32,80
1.	Indikator Output : Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	18 Organisasi	21 Organisasi	21 Organisasi	21 Organisasi	21 Organisasi
2.	Indikator Output : Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	298 Orang	354 Orang	354 Orang	354 Orang	354 Orang
3.	Indikator Output : Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	8 Lembaga	11 Lembaga	11 Lembaga	11 Lembaga	11 Lembaga
4.	Indikator Output : Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	6 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga
5.	Indikator Output : Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2 Kebijakan	2 Kebijakan	3 Kebijakan	4 Kebijakan	4 Kebijakan

6.	Indikator Output : Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga
7.	Indikator Output : Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung tahun 2024-2026 disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah sesuai dengan **Peraturan Bupati Belitung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung** untuk memastikan pencapaian kinerja strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan arahan, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan selanjutnya sebagai tolok ukur kinerja pelaksanaan perangkat daerah.

Jika di kemudian hari terdapat penyesuaian kebijakan pembangunan yang berdampak terhadap rencana strategis perangkat daerah maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEPALA DINAS,

KASIMIN, S.IP.,MAB
Pembina Tk. I
NIP. 196908241990031004

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

Dipindai dengan CamScanner

Perubahan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Tahun Anggaran 2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)		Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Tahun Anggaran 2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab
						Target	Rp. (APBD)	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp												
1.1. Meningkatnya Kesejahteraan PMKS				Persentase menurunnya PMKS per tahun	0,96	0,5		0,5		0,5		0,5				Persentase menurunnya PMKS per tahun	0,96	0,5	25.911.659.318	0,5	13.775.821.673	0,5	12.950.323.825	0,5	52.637.804.816	
	1.1.1 Meningkatnya penanganan PMKS			Persentase PMKS yang tertangani atau mendapatkan layanan	98,79%	98,79%		98,81%		98,83%		98,83%				Persentase PMKS yang tertangani atau mendapatkan layanan	98,79%	98,79%	25.911.659.318	98,81%	13.775.821.673	98,83%	12.950.323.825	98,83%	52.637.804.816	
		1 06 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**				**21.979.445.988**		**9.414.358.579**		**8.101.047.935**		**39.494.852.502**	1 06 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**				**21.979.445.988**		**9.414.358.579**		**8.101.047.935**		**39.494.852.502**	
				1. Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**				**1. Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan**	**100%**	**100%**	**4.599.184.888**	**100%**	**5.613.896.272**	**100%**	**5.745.765.395**	**100%**	**15.958.846.555**	
				2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	**78,70%**	**78,80%**		**78,82%**		**78,85%**		**78,85%**				**2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**	**78,70%**	**78,80%**	**120.950.000**	**78,82%**	**251.700.000**	**78,85%**	**247.000.000**	**78,85%**	**619.650.000**	
				3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**				**3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**762.217.000**	**100%**	**868.657.400**	**100%**	**908.973.140**	**100%**	**2.539.847.540**	
				4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**				**4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**100%**	**16.497.094.100**	**100%**	**2.680.104.907**	**100%**	**1.199.309.400**	**100%**	**20.376.508.407**	
		1 06 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Keluaran** **Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**6 Dok**	**6 Dok**	**5.000.000**	**6 Dok**	**88.000.000**	**6 Dok**	**96.800.000**	**18 Dok**	**189.800.000**	1 06 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Keluaran** **Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**6 Dok**	**6 Dok**	**5.000.000**	**6 Dok**	**88.000.000**	**6 Dok**	**96.800.000**	**18 Dok**	**189.800.000**	
				Hasil **Terpenuhinya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**				**Hasil** **Terpenuhinya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
		1 06 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dok	3 Dok	3.000.000	3 Dok	55.000.000	3 Dok	60.500.000	9 Dok	118.500.000	1 06 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dok	3 Dok	3.000.000	3 Dok	55.000.000	3 Dok	60.500.000	9 Dok	118.500.000	
		1 06 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan	3 Laporan	2.000.000	3 Laporan	33.000.000	3 Laporan	36.300.000	9 Laporan	71.300.000	1 06 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan	3 Laporan	2.000.000	3 Laporan	33.000.000	3 Laporan	36.300.000	9 Laporan	71.300.000	
		1 06 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Keluaran** **Dokumen keuangan Perangkat Daerah**	**4 Dok**	**3 Dok**	**4.594.184.888**	**3 Dok**	**5.525.896.272**	**3 Dok**	**5.648.965.395**	**9 Dok**	**15.769.046.555**	1 06 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Keluaran** **Dokumen keuangan Perangkat Daerah**	**4 Dok**	**3 Dok**	**4.594.184.888**	**3 Dok**	**5.525.896.272**	**3 Dok**	**5.648.965.395**	**9 Dok**	**15.769.046.555**	
				Hasil **Terpenuhinya dokumen keuangan sesuai peraturan**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**				**Hasil** **Terpenuhinya dokumen keuangan sesuai peraturan**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
		1 06 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 Orang/ bulan	29 Orang/ bulan	4.591.184.888	36 Orang/ bulan	5.522.596.272	36 orang / bulan	5.645.335.395	36 orang / bulan	15.759.116.555	1 06 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 Orang/ bulan	29 Orang/ bulan	4.591.184.888	36 Orang/ bulan	5.522.596.272	36 orang / bulan	5.645.335.395	36 orang / bulan	15.759.116.555	
		1 06 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	2 Dok	2 Dok	3.000.000	2 Dok	3.300.000	2 Dok	3.630.000	6 Dok	9.930.000	1 06 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	2 Dok	2 Dok	3.000.000	2 Dok	3.300.000	2 Dok	3.630.000	6 Dok	9.930.000	
		1 06 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Keluaran** **Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**46 Orang**	**29 Orang**	**120.950.000**	**36 Orang**	**251.700.000**	**36 Orang**	**247.000.000**	**36 Orang**	**619.650.000**	1 06 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Keluaran** **Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**46 Orang**	**29 Orang**	**120.950.000**	**36 Orang**	**251.700.000**	**36 Orang**	**247.000.000**	**36 Orang**	**619.650.000**	
				Hasil **Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**	**75%**	**78,80%**		**78,82%**		**78,85%**		**78,85%**				**Hasil** **Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**	**75%**	**78,80%**		**78,82%**		**78,85%**		**78,85%**		
		1 06 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Keluaran Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	1 Unit	5.000.000					1 Unit	5.000.000	1 06 01 2.05 0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Keluaran Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	1 Unit	5.000.000					1 Unit	5.000.000	
		1 06 01 2.05 02	Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	1 Paket	15.950.000	2 paket /94 Stel	51.700.000	2 paket /94 Stel	47.000.000	5 Paket	114.650.000	1 06 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	1 Paket	15.950.000	2 paket /94 Stel	51.700.000	2 paket /94 Stel	47.000.000	5 Paket	114.650.000	
		1 06 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	8 Orang	100.000.000	20 Orang	200.000.000	20 Orang	200.000.000	48 Orang	500.000.000	1 06 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	8 Orang	100.000.000	20 Orang	200.000.000	20 Orang	200.000.000	48 Orang	500.000.000	
		1 06 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Keluaran** **Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**541.534.000**	**100%**	**618.157.400**	**100%**	**649.973.140**	**100%**	**1.809.664.540**	1 06 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Keluaran** **Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**541.534.000**	**100%**	**618.157.400**	**100%**	**649.973.140**	**100%**	**1.809.664.540**	
				Hasil **Persentase pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**				**Hasil** **Persentase pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
		1 06 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	1 Paket	8.470.000	1 paket	9.317.000	3 Paket	27.787.000	1 06 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	1 Paket	8.470.000	1 paket	9.317.000	3 Paket	27.787.000	
		1 06 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	58.410.000	2 Paket	64.251.000	2 Paket	70.676.100	6 Paket	193.337.100	1 06 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	58.410.000	2 Paket	64.251.000	2 Paket	70.676.100	6 Paket	193.337.100	
		1 06 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	15.400.000	1 Paket	16.940.000	1 Paket	18.634.000	3 Paket	50.974.000	1 06 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	15.400.000	1 Paket	16.940.000	1 Paket	18.634.000	3 Paket	50.974.000	
		1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	2 Paket	2 Paket	153.264.000	2 Paket	168.590.400	2 Paket	185.449.440	6 Paket	507.303.840	1 06 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	2 Paket	2 Paket	153.264.000	2 Paket	168.590.400	2 Paket	185.449.440	6 Paket	507.303.840	
		1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	48.700.000	1 Paket	53.570.000	1 Paket	58.927.000	3 Paket	161.197.000	1 06 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	48.700.000	1 Paket	53.570.000	1 Paket	58.927.000	3 Paket	161.197.000	
		1 06 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dok	1 Dok	5.760.000	1 Dok	6.336.000	1 Dok	6.969.600	3 Dok	19.065.600	1 06 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dok	1 Dok	5.760.000	1 Dok	6.336.000	1 Dok	6.969.600	3 Dok	19.065.600	
		1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	300.000.000	36 Laporan	850.000.000	1 06 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	300.000.000	36 Laporan	850.000.000	
		1 06 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Keluaran** **Jenis barang milik daerah**	**-**	**5 Jenis**	**15.876.449.100**	**5 Jenis**	**406.604.907**	**5 Jenis**	**410.309.400**	**15 Jenis**	**16.693.363.407**	1 06 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Keluaran** **Jenis barang milik daerah**	**-**	**5 Jenis**	**15.876.449.100**	**5 Jenis**	**406.604.907**	**5 Jenis**	**410.309.400**	**15 Jenis**	**16.693.363.407**	
				Hasil **Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**				**Hasil** **Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
		1 06 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Keluaran Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	1 Unit	300.000.000	4 Unit	140.000.000	4 Unit	140.000.000	9 Unit	580.000.000	1 06 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Keluaran Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	1 Unit	300.000.000	4 Unit	140.000.000	4 Unit	140.000.000	9 Unit	580.000.000	
		1 06 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Keluaran Jumlah paket mebel yang disediakan	-	112 Unit	154.102.100	7 Unit	10.500.000	6 Unit	11.309.400	125 Unit	175.911.500	1 06 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Keluaran Jumlah paket mebel yang disediakan	-	112 Unit	154.102.100	7 Unit	10.500.000	6 Unit	11.309.400	125 Unit	175.911.500	

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Tahun Anggaran						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)		Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Tahun Anggaran						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab
										2024		2025		2026																2024		2025		2026				
										Target	Rp. (APBD)	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp													Target	Rp. (APBD)	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
		1	06	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran	Jumlah unit peralatan atau mesin lainnya yang disediakan	-	28 Unit	247.347.000	5 Unit	61.104.907	4 Unit	16.000.000	37 Unit	324.451.907	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran	Jumlah unit peralatan atau mesin lainnya yang disediakan	-	28 Unit	247.347.000	5 Unit	61.104.907	4 Unit	16.000.000	37 Unit	324.451.907	
		1	06	01	2.07	09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lain yang disediakan	-	3 Unit	15.170.000.000	2 Unit	195.000.000	1 unit	243.000.000	6 unit	15.608.000.000	1	06	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lain yang disediakan	-	3 Unit	15.170.000.000	2 Unit	195.000.000	1 unit	243.000.000	6 unit	15.608.000.000	
		1	06	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	06	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	06	01	2.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	1 Unit	5.000.000	-	-	-	-	1 Unit	5.000.000	1	06	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	1 Unit	5.000.000	-	-	-	-	1 Unit	5.000.000	
		1	06	01	2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Keluaran**	**Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**220.683.000**	**100%**	**250.500.000**	**100%**	**259.000.000**	**100%**	**730.183.000**	1	06	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Keluaran**	**Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**220.683.000**	**100%**	**250.500.000**	**100%**	**259.000.000**	**100%**	**730.183.000**	
							Hasil	**Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**									**Hasil**	**Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
		1	06	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	3.500.000	12 laporan	4.000.000	36 Laporan	10.500.000	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	3.500.000	12 laporan	4.000.000	36 Laporan	10.500.000	
		1	06	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	51.600.000	12 Laporan	65.000.000	12 Laporan	70.000.000	36 Laporan	186.600.000	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	51.600.000	12 Laporan	65.000.000	12 Laporan	70.000.000	36 Laporan	186.600.000	
		1	06	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran	Jumlah laporan penyediaan jasa layanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	166.083.000	12 laporan	182.000.000	12 laporan	185.000.000	36 laporan	533.083.000	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran	Jumlah laporan penyediaan jasa layanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	166.083.000	12 laporan	182.000.000	12 laporan	185.000.000	36 laporan	533.083.000	
		1	06	01	2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Keluaran**	**Barang milik daerah dalam kondisi baik**	**5 Jenis**	**6 Jenis**	**620.645.000**	**6 Jenis**	**2.273.500.000**	**6 Jenis**	**789.000.000**	**18 Jenis**	**3.683.145.000**	1	06	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Keluaran**	**Barang milik daerah dalam kondisi baik**	**5 Jenis**	**6 Jenis**	**620.645.000**	**6 Jenis**	**2.273.500.000**	**6 Jenis**	**789.000.000**	**18 Jenis**	**3.683.145.000**	
							Hasil	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**									**Hasil**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
		1	06	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 unit	55.000.000	2 Unit	155.000.000	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 unit	55.000.000	2 Unit	155.000.000	
		1	06	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.	24 Unit	21 Unit	229.405.000	22 Unit	230.000.000	26 unit	235.000.000	26 Unit	694.405.000	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.	24 Unit	21 Unit	229.405.000	22 Unit	230.000.000	26 unit	235.000.000	26 Unit	694.405.000	
		1	06	01	2.09	05 Pemeliharaan Mebeleur	Keluaran	Jumlah mebel yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	3.500.000	10 unit	3.500.000	10 unit	4.000.000	10 Unit	11.000.000	1	06	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebeleur	Keluaran	Jumlah mebel yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	3.500.000	10 unit	3.500.000	10 unit	4.000.000	10 Unit	11.000.000	
		1	06	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 Unit	47 Unit	37.740.000	66 Unit	40.000.000	71 Unit	45.000.000	71 Unit	122.740.000	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 Unit	47 Unit	37.740.000	66 Unit	40.000.000	71 Unit	45.000.000	71 Unit	122.740.000	
		1	06	01	2.09	09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan rehabilitasi	3 Unit	2 Unit	200.000.000	3 Unit	1.800.000.000	3 Unit	300.000.000	3 Unit	2.300.000.000	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan rehabilitasi	3 Unit	2 Unit	200.000.000	3 Unit	1.800.000.000	3 Unit	300.000.000	3 Unit	2.300.000.000	
		1	06	01	2.09	10 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	-	2 Unit	100.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	3 Unit	400.000.000	1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	-	2 Unit	100.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	3 Unit	400.000.000	
URUSAN SOSIAL																																				
		1	**06**	**02**		**Program Pemberdayaan Sosial**	**Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial**		**100%**	**100%**	**652.612.350**	**100%**	**731.873.585**	**100%**	**806.560.944**	**100%**	**2.191.046.879**	**1**	**06**	**02**			**Program Pemberdayaan Sosial**	**Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial**		**100%**	**100%**	**652.612.350**	**100%**	**731.873.585**	**100%**	**806.560.944**	**100%**	**2.191.046.879**	
		1	06	02	2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Keluaran**	**Jumlah PSKS yang aktif**	**159 PSKS**	**165 PSKS**	**652.612.350**	**165 PSKS**	**731.873.585**	**165 PSKS**	**806.560.944**	**165 PSKS**	**2.191.046.879**	1	06	02	2.03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Keluaran**	**Jumlah PSKS yang aktif**	**159 PSKS**	**165 PSKS**	**652.612.350**	**165 PSKS**	**731.873.585**	**165 PSKS**	**806.560.944**	**165 PSKS**	**2.191.046.879**	
							Hasil	**Keakuratan data**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**									**Hasil**	**Keakuratan data**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
		1	06	02	2.03	01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah orang yang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	54 Orang	49 Orang	56.570.350	49 Orang	57.200.000	49 Orang	62.920.000	49 Orang	176.690.350	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah orang yang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	54 Orang	49 Orang	56.570.350	49 Orang	57.200.000	49 Orang	62.920.000	49 Orang	176.690.350	
		1	06	02	2.03	02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah orang mendapat Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	5 Orang	127.000.000	5 Orang	82.500.000	5 Orang	90.750.000	5 Orang	300.250.000	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	5 Orang	127.000.000	5 Orang	82.500.000	5 Orang	90.750.000	5 Orang	300.250.000	
		1	06	02	2.03	03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	18 Keluarga	17 Keluarga	190.000.000	17 Keluarga	271.227.385	17 Keluarga	298.350.124	17 Keluarga	759.577.509	1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	18 Keluarga	17 Keluarga	190.000.000	17 Keluarga	271.227.385	17 Keluarga	298.350.124	17 Keluarga	759.577.509	
		1	06	02	2.03	04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	6 Lembaga	6 Lembaga	169.042.000	6 Lembaga	185.946.200	6 Lembaga	204.540.820	6 Lembaga	559.529.020	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	6 Lembaga	6 Lembaga	169.042.000	6 Lembaga	185.946.200	6 Lembaga	204.540.820	6 Lembaga	559.529.020	
		1	06	02	2.03	05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Keluaran	Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan sumberdaya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) kewenangan kabupaten/kota	1 Dok	1 Sertifikat	110.000.000	1 Sertifikat	135.000.000	1 sertifikat	150.000.000	1 Sertifikat	395.000.000	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Keluaran	Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan sumberdaya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) kewenangan kabupaten/kota	n/a	1 Sertifikat	110.000.000	1 Sertifikat	135.000.000	1 sertifikat	150.000.000	1 Sertifikat	395.000.000	
		1	**06**	**03**		**Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**	**1. Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Daerah Asalnya**		**100%**	**100%**	**54.477.500**	**100%**	**59.925.250**	**100%**	**65.917.775**	**100%**	**180.320.525**	**1**	**06**	**03**			**Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**	**1. Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Daerah Asalnya**		**100%**	**100%**	**54.477.500**	**100%**	**59.925.250**	**100%**	**65.917.775**	**100%**	**180.320.525**	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Tahun Anggaran						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)		Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Tahun Anggaran						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab
											2024		2025		2026																						
											Target	Rp. (APBD)	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp																			
		1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Keluaran	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	12 Orang	12 Orang	54.477.500	12 Orang	59.925.250	12 orang	65.917.775	36 Orang	180.320.525	1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Keluaran	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	12 Orang	12 Orang	54.477.500	12 Orang	59.925.250	12 orang	65.917.775	36 Orang	180.320.525	
								Hasil	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100%	100%		100%		100%		100%									Hasil	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100%	100%		100%		100%		100%			
		1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Keluaran	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	12 Orang	12 Orang	54.477.500	12 Orang	59.925.250	12 orang	65.917.775	36 Orang	180.320.525	1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Keluaran	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	12 Orang	12 Orang	54.477.500	12 Orang	59.925.250	12 orang	65.917.775	36 Orang	180.320.525	
	.....	**1**	**06**	**04**			**Program Rehabilitasi Sosial**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial**		**100%**	**100%**	**1.242.015.740**		**1.356.834.490**		**1.474.684.425**	**100%**	**4.073.534.655**	**1**	**06**	**04**			**Program Rehabilitasi Sosial**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial**		**100%**	**100%**	**1.242.015.740**		**1.356.834.490**		**1.474.684.425**	**100%**	**4.073.534.655**	
		1	06	04	2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Keluaran**	**Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan yang mendapatkan rehabilitasi sosial**	**105 Orang**	**105 Orang**	**1.160.008.800**	**105 Orang**	**1.267.125.450**	**105 Orang**	**1.376.503.075**	**105 Orang**	**3.803.637.325**	1	06	04	2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Keluaran**	**Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan yang mendapatkan rehabilitasi sosial**	**105 Orang**	**105 Orang**	**1.160.008.800**	**105 Orang**	**1.267.125.450**	**105 Orang**	**1.376.503.075**	**105 Orang**	**3.803.637.325**	
								Hasil	**Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**									**Hasil**	**Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**			
		1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Keluaran	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	105 Orang	105 Orang	210.666.800	105 Orang	217.349.200	105 orang	217.349.200	105 orang	645.365.200	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Keluaran	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	105 Orang	105 Orang	210.666.800	105 Orang	217.349.200	105 orang	217.349.200	105 orang	645.365.200	
		1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Keluaran	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	-	105 Orang	57.822.500	105 Orang	63.604.750	105 orang	69.965.225	105 orang	191.392.475	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Keluaran	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	-	105 Orang	57.822.500	105 Orang	63.604.750	105 orang	69.965.225	105 orang	191.392.475	
		1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Keluaran	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/ Kota	-	21 Orang	70.000.000	21 Orang	77.000.000	21 Orang	84.700.000	63 Orang	231.700.000	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Keluaran	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/ Kota	-	21 Orang	70.000.000	21 Orang	77.000.000	21 Orang	84.700.000	63 Orang	231.700.000	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Tahun Anggaran						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)		Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Tahun Anggaran						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab
											2024		2025		2026																					
											Target	Rp. (APBD)	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp																		
		1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Keluaran	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	105 Orang	105 orang	441.097.000	105 orang	485.206.750	105 orang	533.727.425	105 orang	1.460.031.175	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Keluaran	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	105 Orang	105 orang	441.097.000	105 orang	485.206.750	105 orang	533.727.425	105 orang	1.460.031.175	
		1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Keluaran	Jumlah peserta bimbingan fisik mental spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	32 Orang	30 Orang	50.000.000	30 Orang	60.000.000	30 Orang	70.000.000	90 Orang	180.000.000	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Keluaran	Jumlah peserta bimbingan fisik mental spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	32 Orang	30 Orang	50.000.000	30 Orang	60.000.000	30 Orang	70.000.000	90 Orang	180.000.000	
		1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Keluaran	Jumlah peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	-	10 Orang	5.000.000	10 Orang	6.000.000	10 Orang	7.000.000	30 Orang	18.000.000	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Keluaran	Jumlah peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	-	10 Orang	5.000.000	10 Orang	6.000.000	10 Orang	7.000.000	30 Orang	18.000.000	
		1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Keluaran	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas kewenangan Kabupaten/Kota	-	2 orang	4.590.000	12 Orang	5.049.000	12 orang	5.553.900	36 Orang	15.192.900	1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Keluaran	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas kewenangan Kabupaten/Kota	-	2 orang	4.590.000	12 Orang	5.049.000	12 orang	5.553.900	36 Orang	15.192.900	
		1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kewenangan Kabupaten/Kota	-	7 Orang	3.865.000	7 Orang	4.251.500	7 Orang	4.676.650	21 Orang	12.793.150	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kewenangan Kabupaten/Kota	-	7 Orang	3.865.000	7 Orang	4.251.500	7 Orang	4.676.650	21 Orang	12.793.150	
		1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan kewenangan Kabupaten/Kota	-	105 orang	184.750.000	105 orang	203.225.000	105 orang	223.547.500	105 orang	611.522.500	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan kewenangan Kabupaten/Kota	-	105 orang	184.750.000	105 orang	203.225.000	105 orang	223.547.500	105 orang	611.522.500	
		1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	-	12 orang	75.662.500	12 Orang	83.228.750	12 orang	91.551.625	36 Orang	250.442.875	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	-	12 orang	75.662.500	12 Orang	83.228.750	12 orang	91.551.625	36 Orang	250.442.875	
		1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	-	12 orang	7.715.000	12 Orang	8.486.500	12 orang	9.335.150	36 Orang	25.536.650	1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	-	12 orang	7.715.000	12 Orang	8.486.500	12 orang	9.335.150	36 Orang	25.536.650	
		1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	-	12 orang	48.840.000	12 Orang	53.724.000	12 orang	59.096.400	36 Orang	161.660.400	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	-	12 orang	48.840.000	12 Orang	53.724.000	12 orang	59.096.400	36 Orang	161.660.400	
		1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial**	**Keluaran**	**Persentase PMKS yang menerima layanan rehabilitasi sosial**	**100%**	**100%**	**82.006.940**	**100%**	**89.709.040**	**100%**	**98.181.350**	**100%**	**269.897.330**	**1**	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial**	**Keluaran**	**Persentase PMKS yang menerima layanan rehabilitasi sosial**	**100%**	**100%**	**82.006.940**	**100%**	**89.709.040**	**100%**	**98.181.350**	**100%**	**269.897.330**	
								Hasil	**Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**								**Hasil**	**Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
		1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	20 Orang	2.897.500	30 Orang	2.897.500	30 Orang	2.897.500	80 Orang	8.692.500	1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	20 Orang	2.897.500	30 Orang	2.897.500	30 Orang	2.897.500	80 Orang	8.692.500	
		1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Keluaran	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di luar panti kewenangan Kabupaten/ Kota	12 Orang	5 Orang	10.500.000	5 Orang	11.550.000	5 Orang	12.705.000	15 Orang	34.755.000	1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Keluaran	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di luar panti kewenangan Kabupaten/ Kota	12 Orang	5 Orang	10.500.000	5 Orang	11.550.000	5 Orang	12.705.000	15 Orang	34.755.000	
		1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Keluaran	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	15 Orang	33.921.000	15 Orang	37.313.100	15 Orang	41.044.410	45 Orang	112.278.510	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Keluaran	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	15 Orang	33.921.000	15 Orang	37.313.100	15 Orang	41.044.410	45 Orang	112.278.510	
		1	06	04	2.02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Keluaran	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	-	10 Orang	2.088.440	10 Orang	2.088.440	10 Orang	2.088.440	30 Orang	6.265.320	1	06	04	2.02	0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Keluaran	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	-	10 Orang	2.088.440	10 Orang	2.088.440	10 Orang	2.088.440	30 Orang	6.265.320	
		1	06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Keluaran	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	-	2 Orang	32.600.000	2 Orang	35.860.000	2 Orang	39.446.000	6 Orang	107.906.000	1	06	04	2.02	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Keluaran	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	-	2 Orang	32.600.000	2 Orang	35.860.000	2 Orang	39.446.000	6 Orang	107.906.000	
.....		**1**	**06**	**05**			**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial**		**97,25%**	**100%**	**1.105.194.750**	**100%**	**1.252.125.480**	**100%**	**1.442.338.028**	**100%**	**3.799.658.258**	**1**	**06**	**05**			**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial**		**97,25%**	**100%**	**1.105.194.750**	**100%**	**1.252.125.480**	**100%**	**1.442.338.028**	**100%**	**3.799.658.258**	
		1	06	05	2.01		**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Keluaran**	**Terpenuhinya pemeliharaan anak terlantar**	**-**	**7 Orang**	**130.622.500**	**7 Orang**	**143.684.750**	**7 Orang**	**158.053.225**	**7 Orang**	**432.360.475**	1	06	05	2.01		**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Keluaran**	**Terpenuhinya pemeliharaan anak terlantar**	**-**	**7 Orang**	**130.622.500**	**7 Orang**	**143.684.750**	**7 Orang**	**158.053.225**	**7 Orang**	**432.360.475**	
								Hasil	**Terpeliharanya anak terlantar**		**100%**		**100%**		**100%**										**Hasil**	**Terpeliharanya anak terlantar**		**100%**		**100%**		**100%**			
		1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Keluaran	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten /Kota	-	32 Orang	63.737.500	32 Orang	70.111.250	32 Orang	77.122.375	32 Orang	210.971.125	1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Keluaran	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten /Kota	-	32 Orang	63.737.500	32 Orang	70.111.250	32 Orang	77.122.375	32 Orang	210.971.125	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Tahun Anggaran						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)		Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Tahun Anggaran						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab
											2024		2025		2026																					
											Target	Rp. (APBD)	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp																		
		1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Keluaran	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten /Kota	-	8 Orang	57.420.000	8 Orang	63.162.000	8 Orang	69.478.200	24 Orang	190.060.200	1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Keluaran	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten /Kota	-	8 Orang	57.420.000	8 Orang	63.162.000	8 Orang	69.478.200	24 Orang	190.060.200	
		1	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Keluaran	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten /Kota	-	8 Orang	9.465.000	8 Orang	10.411.500	8 Orang	11.452.650	24 Orang	31.329.150	1	06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Keluaran	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten /Kota	-	8 Orang	9.465.000	8 Orang	10.411.500	8 Orang	11.452.650	24 Orang	31.329.150	
		1	06	05	2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Keluaran**	**Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi**	**100%**	**100%**	**974.572.250**	**100%**	**1.108.440.730**	**100%**	**1.284.284.803**	**100%**	**3.367.297.783**	1	06	05	2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Keluaran**	**Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi**	**100%**	**100%**	**974.572.250**	**100%**	**1.108.440.730**	**100%**	**1.284.284.803**	**100%**	**3.367.297.783**	
								Hasil	**Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**									**Hasil**	**Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
		1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/ Kota	8682 Keluarga	8740 Keluarga	557.807.950	8740 Keluarga	650.000.000	8740 Keluarga	780.000.000	8740 Keluarga	1.987.807.950	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/ Kota	8682 Keluarga	8740 Keluarga	557.807.950	8740 Keluarga	650.000.000	8740 Keluarga	780.000.000	8740 Keluarga	1.987.807.950	
		1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluaran	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	-	10 Keluarga	316.764.300	10 Keluarga	348.440.730	10 Keluarga	383.284.803	30 Keluarga	1.048.489.833	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluaran	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	-	10 Keluarga	316.764.300	10 Keluarga	348.440.730	10 Keluarga	383.284.803	30 Keluarga	1.048.489.833	
		1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Keluaran	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota	-	18 Orang	100.000.000	20 Orang	110.000.000	18 Orang	121.000.000	56 Orang	331.000.000	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Keluaran	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota	-	18 Orang	100.000.000	20 Orang	110.000.000	18 Orang	121.000.000	56 Orang	331.000.000	
		1	**06**	**06**			**Program Penanganan Bencana**	**Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana**		**100%**	**100%**	**633.312.990**	**100%**	**696.644.289**	**100%**	**765.308.718**	**100%**	**2.095.265.997**	**1**	**06**	**06**			**Program Penanganan Bencana**	**Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana**		**100%**	**100%**	**633.312.990**	**100%**	**696.644.289**	**100%**	**765.308.718**	**100%**	**2.095.265.997**	
		1	06	06	2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota**	**Keluaran**	**Korban bencana yang menerima bantuan permakanan**	**100%**	**100%**	**93.377.500**	**100%**	**97.715.250**	**100%**	**102.486.775**	**100%**	**102.486.775**	1	06	06	2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota**	**Keluaran**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial**	**n/a**	**100%**	**93.377.500**	**100%**	**97.715.250**	**100%**	**102.486.775**	**100%**	**293.579.525**	
								Hasil	**Terlayaninya korban bencana**	**NA**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**									**Hasil**	**Terlayaninya korban bencana**	**n/a**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
		1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan		Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kabupaten/ Kota	NA	40 orang	50.000.000	40 orang	50.000.000	40 orang	50.000.000	120 Orang	50.000.000	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Keluaran	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kabupaten/ Kota	n/a	40 orang	50.000.000	40 orang	50.000.000	40 orang	50.000.000	120 Orang	150.000.000	
																			1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	40 orang	5.000.000	40 orang	5.500.000	40 orang	6.000.000	120 Orang	16.500.000	
																			1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Keluaran	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	1 Unit	3.826.000	3 Unit	4.000.000	5 Unit	5.000.000	5 Unit	12.826.000	
																			1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	40 orang	3.826.000	40 orang	4.000.000	40 orang	5.000.000	120 Orang	12.826.000	
		1	06	06	2.02	05	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	40 orang	43.377.500	40 orang	47.715.250	40 orang	52.486.775	120 Orang	52.486.775	1	06	06	2.02	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Keluaran	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	40 orang	30.725.500	40 orang	34.215.250	40 orang	36.486.775	120 Orang	101.427.525	
		1	06	06	2.02		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota**	**Keluaran**	**Korban bencana yang menerima bantuan sosial**	**100%**	**100%**	**539.935.490**	**100%**	**598.929.039**	**100%**	**662.821.943**	**100%**	**1.801.686.472**	1	06	06	2.02		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota**	**Keluaran**	**Korban bencana yang menerima bantuan sosial**	**100%**	**100%**	**539.935.490**	**100%**	**598.929.039**	**100%**	**662.821.943**	**100%**	**1.801.686.472**	
								Hasil	**Terlayaninya korban bencana**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**									**Hasil**	**Terlayaninya korban bencana**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
		1	**06**	**06**	2.02	01	Koordinasi, Sosilisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Keluaran	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	3 Kampung	50.000.000	3 Kampung	60.000.000	3 Kampung	70.000.000	3 Kampung	180.000.000	**1**	**06**	**06**	2.02	0001	Koordinasi, Sosilisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Keluaran	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	3 Kampung	50.000.000	3 Kampung	60.000.000	3 Kampung	70.000.000	3 Kampung	180.000.000	
		1	**06**	**06**	2.02	02	Koordinasi, Sosilisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Keluaran	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	45 Orang	45 Orang	489.935.490	45 Orang	538.929.039	45 Orang	592.821.943	45 Orang	1.621.686.472	**1**	**06**	**06**	2.02	0002	Koordinasi, Sosilisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Keluaran	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	45 Orang	45 Orang	489.935.490	45 Orang	538.929.039	45 Orang	592.821.943	45 Orang	1.621.686.472	
	.....	**1**	**06**	**07**			**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**Taman Makam Pahlawan yang tertata**		**100%**	**100%**	**244.600.000**	**100%**	**264.060.000**	**100%**	**294.466.000**	**100%**	**803.126.000**	**1**	**06**	**07**			**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**Taman Makam Pahlawan yang tertata**		**100%**	**100%**	**244.600.000**	**100%**	**264.060.000**	**100%**	**294.466.000**	**100%**	**803.126.000**	
		1	**06**	**07**	2.01		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota**	**Keluaran**	**Terlaksananya pengeloalaan Taman Makam Pahlawan**	**100%**	**100%**	**244.600.000**	**100%**	**264.060.000**	**100%**	**294.466.000**	**100%**	**803.126.000**	**1**	**06**	**07**	2.01		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota**	**Keluaran**	**Terlaksananya pengeloalaan Taman Makam Pahlawan**	**100%**	**100%**	**244.600.000**	**100%**	**264.060.000**	**100%**	**294.466.000**	**100%**	**803.126.000**	
								Hasil	**Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**									**Hasil**	**Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
		1	**06**	**07**	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	1 Dok	150.000.000	1 Dok	160.000.000	1 Dok	180.000.000	3 Dok	490.000.000	**1**	**06**	**07**	2.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	1 Dok	150.000.000	1 Dok	160.000.000	1 Dok	180.000.000	3 Dok	490.000.000	
		1	**06**	**07**	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada taman makam pahlawan kabupaten/kota	54 Makam	55 Makam	94.600.000	55 Makam	104.060.000	55 Makam	114.466.000	55 Makam	313.126.000	**1**	**06**	**07**	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada taman makam pahlawan kabupaten/kota	54 Makam	55 Makam	94.600.000	55 Makam	104.060.000	55 Makam	114.466.000	55 Makam	313.126.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																																					

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Tahun Anggaran						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)		Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Tahun Anggaran						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab
											2024		2025		2026																2024		2025		2026			
											Target	Rp. (APBD)	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp													Target	Rp. (APBD)	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
1.2. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan								Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		53,42%	53,43		53,44		53,45		53,45												Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		53,42%	53,43	654.894.519	53,44	718.003.971	53,45	787.101.368	53,45	2.159.999.858	
	1.2.1 Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan							Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE)		-	Pratama		Pratama		Madya		Madya												Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE)		-	Pratama	654.894.519	Pratama	718.003.971	Madya	787.101.368	Madya	2.159.999.858	
		2	08	02			**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Persentase ARG pada belanja langsung APBD**		**35,75%**	**36,00%**	**562.727.520**	**36,25%**	**617.870.272**	**36,50%**	**678.204.299**	**36,50%**	**1.858.802.091**	2	08	02				**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Persentase ARG pada belanja langsung APBD**		**35,75%**	**36,00%**	**562.727.520**	**36,25%**	**617.870.272**	**36,50%**	**678.204.299**	**36,50%**	**1.858.802.091**	
		2	08	02	2.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**Keluaran**	**Lembaga pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG**	**NA**	**10 PD**	**44.879.100**	**10 PD**	**48.237.060**	**15 PD**	**51.607.766**	**35 PD**	**144.723.926**	2	08	02	2.01			**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**Keluaran**	**Lembaga pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG**	**NA**	**10 PD**	**44.879.100**	**10 PD**	**48.237.060**	**15 PD**	**51.607.766**	**35 PD**	**144.723.926**	
								Hasil	**Terlaksananya kebijakan PUG**	**NA**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**									**Hasil**	**Terlaksananya kebijakan PUG**	**NA**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
		2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Keluaran	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pengarusutamaan gender PUG kewenangan kabupaten/kota	NA	1 Dok	19.930.000	1 Dok	20.793.050	1 Dok	21.419.355	3 dok	62.142.405	2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Keluaran	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pengarusutamaan gender PUG kewenangan kabupaten/kota	NA	1 Dok	19.930.000	1 Dok	20.793.050	1 Dok	21.419.355	3 dok	62.142.405	
		2	08	02	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Keluaran	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG) kewenangan kabupaten/kota	NA	35 Perangkat Daerah	24.949.100	35 Perangkat Daerah	27.444.010	35 perangkat daerah	30.188.411	35 Perangkat Daerah	82.581.521	2	08	02	2.01	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Keluaran	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG) kewenangan kabupaten/kota	NA	35 Perangkat Daerah	24.949.100					35 Perangkat Daerah	24.949.100	
																			2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggaraan PUG				40 Orang	27.444.010	40 Orang	30.188.411	80 Orang	57.632.421	
		2	08	02	2.02		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**Keluaran**	**Terfasilitasinya organisasi perempuan**	**19 Organisasi**	**19 Organisasi**	**459.346.905**	**19 Organisasi**	**505.281.545**	**19 Organisasi**	**555.809.700**	**19 Organisasi**	**1.520.438.150**	2	08	02	2.02		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**Keluaran**	**Terfasilitasinya organisasi perempuan**	**19 Organisasi**	**19 Organisasi**	**459.346.905**	**19 Organisasi**	**505.281.545**	**19 Organisasi**	**555.809.700**	**19 Organisasi**	**1.520.438.150**	
								Hasil	**Meningkatnya peran perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**									**Hasil**	**Meningkatnya peran perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
		2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Keluaran	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	1 Dok	1 Dok	29.402.450	1 Dok	32.342.645	1 Dok	35.576.910	3 dok	97.322.005	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Keluaran	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	1 Dok	1 Dok	29.402.450	1 Dok	32.342.645	1 Dok	35.576.910	3 dok	97.322.005	
		2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Keluaran	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	19 Organisasi	19 Organisasi	429.944.455	19 Organisasi	472.938.900	19 organisasi	520.232.790	19 Organisasi	1.423.116.145	2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Keluaran	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	19 Organisasi	21 Organisasi	429.944.455	21 Organisasi	472.938.900	21 organisasi	520.232.790	19 Organisasi	1.423.116.145	
		2	08	02	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Keluaran**	**Terfasilitasinya Forum Puspa Kabupaten Belitung**	**1 Lembaga**	**1 Lembaga**	**58.501.515**	**1 Lembaga**	**64.351.667**	**1 Lembaga**	**70.786.833**	**1 Lembaga**	**193.640.015**	2	08	02	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Keluaran**	**Terfasilitasinya Forum Puspa Kabupaten Belitung**	**1 Lembaga**	**1 Lembaga**	**58.501.515**	**1 Lembaga**	**64.351.667**	**1 Lembaga**	**70.786.833**	**1 Lembaga**	**193.640.015**	
								Hasil	**Meningkatnya layanan pemberdayaan perempuan dan anak**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**									**Hasil**	**Meningkatnya layanan pemberdayaan perempuan dan anak**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
		2	08	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan pendampingan	1 Lembaga	1 Lembaga	30.941.515	1 Lembaga	34.035.667	1 lembaga	37.439.233	1 Lembaga	102.416.415	2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan pendampingan	1 Lembaga	1 Lembaga	30.941.515	1 Lembaga	34.035.667	1 lembaga	37.439.233	1 Lembaga	102.416.415	
		2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	-	30 orang	13.160.000	30 orang	14.476.000	30 orang	15.923.600	30 Orang	43.559.600	2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	-	30 orang	13.160.000	30 orang	14.476.000	30 orang	15.923.600	30 Orang	43.559.600	
		2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	keluaran	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	1 dok	14.400.000	1 dok	15.840.000	1 dok	17.424.000	3 dok	47.664.000	2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	keluaran	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	1 dok	14.400.000	1 dok	15.840.000	1 dok	17.424.000	3 dok	47.664.000	
		2	08	04			**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Persentase keluarga yang terlayani**		**100%**	**100%**	**43.529.157**	**100%**	**46.632.073**	**100%**	**50.045.280**	**100%**	**140.206.510**	2	08	04			**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Persentase keluarga yang terlayani**		**100%**	**100%**	**43.529.157**	**100%**	**46.632.073**	**100%**	**50.045.280**	**100%**	**140.206.510**	
		2	08	04	2.02	1	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Keluaran**	**Lembaga keluarga yang dibina**	**1 Lembaga**	**1 Lembaga**	**43.529.157**	**1 Lembaga**	**46.632.073**	**1 Lembaga**	**50.045.280**	**1 Lembaga**	**140.206.510**	2	08	04	2.02	1	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Keluaran**	**Lembaga keluarga yang dibina**	**1 Lembaga**	**1 Lembaga**	**43.529.157**	**1 Lembaga**	**46.632.073**	**1 Lembaga**	**50.045.280**	**1 Lembaga**	**140.206.510**	
								Hasil	**Meningkatnya layanan keluarga**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**									**Hasil**	**Meningkatnya layanan keluarga**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
		2	08	04	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan advokasi dan pendampingan	1 Lembaga	1 lembaga	31.029.157	1 Lembaga	34.132.073	1 lembaga	37.545.280	1 lembaga	102.706.510	2	08	04	2.02	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	1 lembaga	31.029.157	1 Lembaga	34.132.073	1 lembaga	37.545.280	1 lembaga	102.706.510	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Tahun Anggaran						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)		Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Tahun Anggaran						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab
											2024		2025		2026																2024		2025		2026			
											Target	Rp. (APBD)	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp													Target	Rp. (APBD)	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
		2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	keluaran	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	25 orang	12.500.000	25 orang	12.500.000	25 orang	12.500.000	25 orang	37.500.000	2	08	04	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	keluaran	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	25 orang	12.500.000	25 orang	12.500.000	25 orang	12.500.000	25 orang	37.500.000	
		2	**08**	**05**			**Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**Persentase pemenuhan data sistem informasi gender dan anak (SIGA)**		**55,80%**	**65%**	**48.637.842**	**70%**	**53.501.626**	**75%**	**58.851.789**	**75%**	**160.991.257**	**2**	**08**	**05**			**Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**Persentase pemenuhan data sistem informasi gender dan anak (SIGA)**		**55,80%**	**65%**	**48.637.842**	**70%**	**53.501.626**	**75%**	**58.851.789**	**75%**	**160.991.257**	
		2	08	05	2.01		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Keluaran**	**Tersedianya data gender dan anak**	**1 Dok**	**1 Dok**	**48.637.842**	**1 Dok**	**53.501.626**	**1 Dok**	**58.851.789**	**3 Dok**	**160.991.257**	2	08	05	2.01		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Keluaran**	**Tersedianya data gender dan anak**	**1 Dok**	**1 Dok**	**48.637.842**	**1 Dok**	**53.501.626**	**1 Dok**	**58.851.789**	**3 Dok**	**160.991.257**	
								Hasil	**Data terpilah gender dan anak yang akurat**	**80%**	**80%**		**80%**		**80%**		**80%**								**Hasil**	**Data terpilah gender dan anak yang akurat**	**80%**	**80%**		**80%**		**80%**		**80%**		
		2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	1 Dok	1 Dok	48.637.842	1 Dok	53.501.626	1 Dok	58.851.789	3 dok	160.991.257	2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	1 Dok	1 Dok	48.637.842	1 Dok	53.501.626	1 Dok	58.851.789	3 dok	160.991.257	
1.3.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan							Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak		3,25	3,20		3,18		3,16		3,16								Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak		3,25	3,20	1.007.800.000	3,18	868.340.000	3,16	955.174.000	3,16	2.831.314.000	
	1.3.1 Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan							Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak		3,25	3,20		3,18		3,16		3,16								Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak		3,25	3,20	1.007.800.000	3,18	868.340.000	3,16	955.174.000	3,16	2.831.314.000	
	.....	**2**	**08**	**03**			**Program Perlindungan Perempuan**	**Persentase layanan perlindungan perempuan**		**100%**	**100%**	**300.000.000**	**100%**	**327.000.000**	**100%**	**362.700.000**	**100%**	**989.700.000**	**2**	**08**	**03**			**Program Perlindungan Perempuan**	**Persentase layanan perlindungan perempuan**		**100%**	**100%**	**300.000.000**	**100%**	**327.000.000**	**100%**	**362.700.000**	**100%**	**989.700.000**	
		2	08	03	2.01		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah/ Kabupaten**	**Keluaran**	**Terlaksananya pelayanan perlindungan perempuan dan anak**	**100%**	**100%**	**175.000.000**	**100%**	**192.500.000**	**100%**	**211.750.000**	**100%**	**579.250.000**	2	08	03	2.01		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah/ Kabupaten**	**Keluaran**	**Terlaksananya pelayanan perlindungan perempuan dan anak**	**100%**	**100%**	**175.000.000**	**100%**	**192.500.000**	**100%**	**211.750.000**	**100%**	**579.250.000**	
								Hasil	**Persentase penanganan kasus**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**								**Hasil**	**Persentase penanganan kasus**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
		2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dok	1 dok	175.000.000	1 dok	192.500.000	1 dok	211.750.000	3 dok	579.250.000	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dok	1 dok	175.000.000	1 dok	192.500.000	1 dok	211.750.000	3 dok	579.250.000	
		2	08	03	2.02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Keluaran**	**Jumlah lembaga yang terfasilitasi**	**3 Lembaga**	**3 Lembaga**	**125.000.000**	**3 Lembaga**	**134.500.000**	**3 Lembaga**	**150.950.000**	**3 Lembaga**	**410.450.000**	2	08	03	2.02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Keluaran**	**Jumlah lembaga yang terfasilitasi**	**3 Lembaga**	**3 Lembaga**	**125.000.000**	**3 Lembaga**	**134.500.000**	**3 Lembaga**	**150.950.000**	**3 Lembaga**	**410.450.000**	
								Hasil	**Meningkatnya layanan perlindungan perempuan**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**								**Hasil**	**Meningkatnya layanan perlindungan perempuan**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
		2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan	40 Orang	22 Orang	-	21 Orang	-	20 Orang	-	77 Orang	-	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan	40 Orang	22 Orang	-	21 Orang	-	20 Orang	-	77 Orang	-	
		2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/ Kota	11 Layanan	11 Layanan	125.000.000	11 Layanan	134.500.000	11 Layanan	150.950.000	11 Layanan	410.450.000	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/ Kota	11 Layanan	11 Layanan	125.000.000	11 Layanan	134.500.000	11 Layanan	150.950.000	11 Layanan	410.450.000	
		2	**08**	**06**			**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Status Kabupaten Layak Anak (KLA)**		**Pratama**	**Madya**	**437.000.000**	**Madya**	**480.700.000**	**Madya**	**528.770.000**	**Madya**	**1.446.470.000**	**2**	**08**	**06**			**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Status Kabupaten Layak Anak (KLA)**		**Pratama**	**Madya**	**437.000.000**	**Madya**	**480.700.000**	**Madya**	**528.770.000**	**Madya**	**1.446.470.000**	
		2	08	06	2.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Keluaran**	**Tercapainya peningkatan status KLA**	**Pratama**	**Madya**	**52.000.000**	**Madya**	**57.200.000**	**Madya**	**62.920.000**	**Madya**	**172.120.000**	2	08	06	2.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Keluaran**	**Tercapainya peningkatan status KLA**	**Pratama**	**Madya**	**52.000.000**	**Madya**	**57.200.000**	**Madya**	**62.920.000**	**Madya**	**172.120.000**	
								Hasil	**Meningkatnya perlindungan terhadap anak**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**								**Hasil**	**Meningkatnya perlindungan terhadap anak**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
		2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	1 Dok	1 Dok	52.000.000	1 Dok	57.200.000	1 Dok	62.920.000	3 Dok	172.120.000	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	1 Dok	1 Dok	52.000.000	1 Dok	57.200.000	1 Dok	62.920.000	3 Dok	172.120.000	
		2	08	06	2.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Keluaran**	**Terfasilitasinya forum anak Kabupaten Belitung**	**1 Dok**	**1 Dok**	**385.000.000**	**1 Dok**	**423.500.000**	**1 Dok**	**465.850.000**	**1 Dok**	**1.274.350.000**	2	08	06	2.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Keluaran**	**Terfasilitasinya forum anak Kabupaten Belitung**	**1 Dok**	**1 Dok**	**385.000.000**	**1 Dok**	**423.500.000**	**1 Dok**	**465.850.000**	**1 Dok**	**1.274.350.000**	
								Hasil	**Meningkatnya layanan terhadap anak**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**								**Hasil**	**Meningkatnya layanan terhadap anak**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
		2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	110.000.000	1 Dok	121.000.000	1 Dok	133.100.000	3 Dok	364.100.000	2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	110.000.000	1 Dok	121.000.000	1 Dok	133.100.000	3 Dok	364.100.000	
		2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring lembaga antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dok	1 Dok	275.000.000	1 Dok	302.500.000	1 Dok	332.750.000	2 Dok	910.250.000	2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring lembaga antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dok	1 Dok	275.000.000	1 Dok	302.500.000	1 Dok	332.750.000	2 Dok	910.250.000	
		2	**08**	**07**			**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten**		**100%**	**100%**	**52.400.000**	**100%**	**60.640.000**	**100%**	**63.704.000**	**100%**	**176.744.000**	**2**	**08**	**07**			**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten**		**100%**	**100%**	**270.800.000**	**100%**	**60.640.000**	**100%**	**63.704.000**	**100%**	**395.144.000**	
																			2	08	07	2.01		**Pendegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah**	**Keluaran**	**Tersedianya layanan dan SDM dalam pencegahan KTA**		**100%**	**130.000.000**		-		-	**100%**	**130.000.000**	

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Tahun Anggaran						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)		Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Tahun Anggaran						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab
										2024		2025		2026																							
										Target	Rp. (APBD)	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp																				
																									Hasil	Meningkatnya Layanan dan SDM dalam Pencegahan KTA		100%									
																		2	08	07	2.02	0004	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/ Program/ Kegiatan Pencegahan KTA	Keluaran	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan/ pencegahan KTA		510 Orang	130.000.000					510 orang	130.000.000	
									NA	-	-	-	-	-	-	-	-	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran	Tersedianya layanan perlindungan khusus anak tingkat Desa/ Kelurahan	NA	100%	7.400.000	100%	8.140.000	100%	8.954.000	100%	24.494.000	
									NA	-		-		-		-							Hasil	Meningkatnya layanan perlindungan khusus anak tingkat Desa/ Kelurahan	NA	100%		100%		100%		100%		
									NA		-		-		-			2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Keluaran	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	NA	5 Orang	7.400.000					5 Orang	7.400.000	
									NA		-		-		-			2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Keluaran	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	NA			4 Layanan	8.140.000	3 Layanan	8.954.000	7 Layanan	17.094.000	
		2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran	Tersedianya layanan perlindungan anak tingkat Desa/ Kelurahan	NA	100%	52.400.000	100%	60.640.000	100%	63.704.000	100%	176.744.000	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran	Tersedianya layanan perlindungan anak tingkat Desa/ Kelurahan	NA	100%	133.400.000	100%	52.500.000	100%	54.750.000	100%	240.650.000	
								Hasil	Meningkatnya layanan perlindungan anak tingkat Desa/ Kelurahan	NA	100%		100%		100%		100%													Hasil	Meningkatnya layanan perlindungan anak tingkat Desa/ Kelurahan	NA	100%		100%		100%		100%		
		2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	1 Dok	45.000.000	1 Dok	52.500.000	1 Dok	54.750.000	3 Dok	152.250.000	2	08	07	2.03	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Keluaran	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	NA	1 Keg	45.000.000	1 Keg	52.500.000	1 Keg	54.750.000	3 Keg	152.250.000	
		2	08	07	2.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	1 Dok	7.400.000	1 Dok	8.140.000	1 Dok	8.954.000	3 dok	24.494.000	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah SDM Penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK		48 Orang	88.400.000					48 Orang	88.400.000	
		Total									**27.355.953.837**		**15.362.165.644**		**14.692.599.193**		**57.410.718.674**						**Total**					**27.574.353.837**		**15.362.165.644**		**14.692.599.193**		**57.629.118.674**	
									RPD		27.355.953.837		15.362.165.644		14.692.599.193		57.410.718.674									RPD		27.355.953.837		15.362.165.644		14.692.599.193		57.629.118.674	
									SELISIH		-		-		-		-									SELISIH		218.400.000		-		-		-	

SALINAN

BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026;

b. bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026;

Mengingat: ....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

7. Peraturan ....

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
12. Peraturan Bupati Belitung Nomor10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026.

BAB I ....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
8. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut, sebagai masukan *(input)* untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam bentuk barang/jasa.
9. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas Kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II ....

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

(2) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

(3) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan
b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
h. BAB VIII : Penutup

Pasal 4 ....

Pasal 4

(1) Renstra disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi setelah Rencana Pembangunan Daerah ditetapkan.

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung;
   b. Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung;
   c. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Belitung;
   d. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung;
   e. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung;
   f. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung;
   g. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung;
   h. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung;
   i. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung;
   j. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung;
   k. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung;
   l. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung;
   m. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung;
   n. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung;
   o. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung;
   p. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung;

q. Rencana ....

q. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perindustrian Kabupaten Belitung;
r. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung;
s. Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Belitung;
t. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung;
u. Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung;
v. Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung;
w. Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Belitung;
x. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung;
y. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung;
z. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung;
aa. Rencana Strategis Kecamatan Tanjungpandan;
bb. Rencana Strategis Kecamatan Badau;
cc. Rencana Strategis Kecamatan Sijuk;
dd. Rencana Strategis Kecamatan Membalong; dan
ee. Rencana Strategis Kecamatan Selat Nasik.

Pasal 5

Penjabaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6 ....

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 11 April 2023

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 11 April 2023

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUPARNO, SH
NIP. 198003152009031003

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Jend. A. Yani No.100 Tanjungpandan Belitung Kode Pos 33412
Telp. (0719) 9223136 FAX (0719) 9223136
Email : dpppasbelitung@gmail.com Website : dpppas.belitungkab.go.id

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENSTRA 2024 - 2026

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG

Ketua	:	Kasimin, S.IP.,MAB (Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
Sekretaris	:	Haryono, SKM (Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
Anggota	:	Mukromi, S.Ag (Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial)
Anggota	:	Rusmawati, ST (Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin)
Anggota	:	Dra. Rofridawati (Kepala Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan)
Anggota	:	Erniwati, S.IP (Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak)
Anggota	:	Zuriyani, S.Sos (Analis Kebijakan Muda)
Anggota	:	Nani Prihatin (Analis Kebijakan Muda)
Anggota	:	Sudirman, S.AP (Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda)
Anggota	:	Dwi Martono, S.ST (Analis Kebijakan Muda)
Anggota	:	Juwardi (Analis Kebijakan Muda)
Anggota	:	Maimunah (Analis Kebijakan Muda)
Anggota	:	Inderia Susiani, S.Psi (Analis Pelayanan Sosial)
Anggota	:	Corpriandi, S.AP (Analis Kebijakan Muda)
Anggota	:	Risnawati, A.Md (Kasubbag Kepegawaian dan Umum)
Anggota	:	Aida, A.Md (Analis Kebijakan Muda)
Anggota	:	Nina Kreasih, S.Psi (Analis Kebijakan Muda)
Anggota	:	Dwi Meliza, S.Sos (Pekerja Sosial Pertama)
Anggota	:	Januar Rakhmat, S.Kom (Pranata Komputer Pertama)
Anggota	:	Izzul Mukhary Murindubillah, S.Psi (Analis Pelayanan Sosial)
Anggota	:	Vega Ariyanti, A.Md (Pranata Komputer Mahir)
Anggota	:	Restu Arbelino, S.Psi (Analis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Sosial)

Tanjungpandan, 27 Maret 2023
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung,

KASIMIN, S.IP.,MAB
Pembina Tk. I
NIP. 196908241990031004

Perubahan Kedua Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung

Tujuan	Sasaran	Sebelum Perubahan (Kepmendagri 900-1317 Tahun 2023)																Setelah Perubahan (Kepmendagri 900-3406 Tahun 2024																Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab
		Kode					Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Kode					Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		
											Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp										Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
1.1. Meningkatnya Kesejahteraan PMKS								Persentase menurunnya PMKS per tahun		0,96	0,5	25.911.659.318	0,5	13.775.821.673	0,5	12.950.323.825	0,5	52.637.804.816								Persentase menurunnya PMKS per tahun		0,96	0,5	25.911.659.318,00	0,5	13.775.821.673	0,5	12.950.323.825	0,5	52.637.804.816	
	1.1.1 Meningkatnya penanganan PMKS							Persentase PMKS yang tertangani atau mendapatkan layanan		98,79%	98,79%	25.911.659.318	98,81%	13.775.821.673	98,83%	12.950.323.825	98,83%	52.637.804.816								Persentase PMKS yang tertangani atau mendapatkan layanan		98,79%	98,79%	25.911.659.318,00	98,81%	13.775.821.673	98,83%	12.950.323.825	98,83%	52.637.804.816	
		1	06	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**					**21.979.445.988**		**9.414.358.579**		**8.101.047.935**		**39.494.852.502**	1	06	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**				**21.979.445.988,00**		**9.414.358.579**		**8.101.047.935**		**39.494.852.502**	
								1. Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan		**100%**	**100%**	**4.599.184.888**	**100%**	**5.613.896.272**	**100%**	**5.745.765.395**	**100%**	**15.958.846.555**								**1. Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan**		**100%**	**100%**	**4.599.184.888,00**	**100%**	**5.613.896.272**	**100%**	**5.745.765.395**	**100%**	**15.958.846.555**	
								2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		**78,70%**	**78,80%**	**120.950.000**	**78,82%**	**251.700.000**	**78,85%**	**247.000.000**	**78,85%**	**619.650.000**								**2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**		**78,70%**	**78,80%**	**120.950.000,00**	**78,82%**	**251.700.000**	**78,85%**	**247.000.000**	**78,85%**	**619.650.000**	
								3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah		**100%**	**100%**	**762.217.000**	**100%**	**868.657.400**	**100%**	**908.973.140**	**100%**	**2.539.847.540**								**3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah**		**100%**	**100%**	**762.217.000,00**	**100%**	**868.657.400**	**100%**	**908.973.140**	**100%**	**2.539.847.540**	
								4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		**100%**	**100%**	**16.497.094.100**	**100%**	**2.680.104.907**	**100%**	**1.199.309.400**	**100%**	**20.376.508.407**								**4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**		**100%**	**100%**	**16.497.094.100,00**	**100%**	**2.680.104.907**	**100%**	**1.199.309.400**	**100%**	**20.376.508.407**	
		1	06	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Keluaran**	**Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**6 Dok**	**6 Dok**	**5.000.000**	**6 Dok**	**88.000.000**	**6 Dok**	**96.800.000**	**18 Dok**	**189.800.000**	1	06	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Keluaran**	**Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**6 Dok**	**6 Dok**	**5.000.000,00**	**6 Dok**	**88.000.000**	**6 Dok**	**96.800.000**	**18 Dok**	**189.800.000**	
								Hasil	**Terpenuhinya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**								**Hasil**	**Terpenuhinya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
		1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dok	3 Dok	3.000.000	3 Dok	55.000.000	3 Dok	60.500.000	9 Dok	118.500.000	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dok	3 Dok	3.000.000,00	3 Dok	55.000.000	3 Dok	60.500.000	9 Dok	118.500.000	
		1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan	3 Laporan	2.000.000	3 Laporan	33.000.000	3 Laporan	36.300.000	9 Laporan	71.300.000	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan	3 Laporan	2.000.000,00	3 Laporan	33.000.000	3 Laporan	36.300.000	9 Laporan	71.300.000	
		1	06	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Keluaran**	**Dokumen keuangan Perangkat Daerah**	**4 Dok**	**3 Dok**	**4.594.184.888**	**3 Dok**	**5.525.896.272**	**3 Dok**	**5.648.965.395**	**9 Dok**	**15.769.046.555**	1	06	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Keluaran**	**Dokumen keuangan Perangkat Daerah**	**4 Dok**	**3 Dok**	**4.594.184.888,00**	**3 Dok**	**5.525.896.272**	**3 Dok**	**5.648.965.395**	**9 Dok**	**15.769.046.555**	
								Hasil	**Terpenuhinya dokumen keuangan sesuai peraturan**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**								**Hasil**	**Terpenuhinya dokumen keuangan sesuai peraturan**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
		1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 Orang/ bulan	29 Orang/ bulan	4.591.184.888	36 Orang/ bulan	5.522.596.272	36 orang / bulan	5.645.335.395	36 orang / bulan	15.759.116.555	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 Orang/ bulan	29 Orang/ bulan	4.591.184.888,00	36 Orang/ bulan	5.522.596.272	36 orang / bulan	5.645.335.395	36 orang / bulan	15.759.116.555	
		1	06	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	2 Dok	2 Dok	3.000.000	2 Dok	3.300.000	2 Dok	3.630.000	6 Dok	9.930.000	1	06	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	2 Dok	2 Dok	3.000.000,00	2 Dok	3.300.000	2 Dok	3.630.000	6 Dok	9.930.000	
		1	06	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Keluaran**	**Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**46 Orang**	**29 Orang**	**120.950.000**	**36 Orang**	**251.700.000**	**36 Orang**	**247.000.000**	**36 Orang**	**619.650.000**	1	06	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Keluaran**	**Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**46 Orang**	**29 Orang**	**120.950.000,00**	**36 Orang**	**251.700.000**	**36 Orang**	**247.000.000**	**36 Orang**	**619.650.000**	
								Hasil	**Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**	**75%**	**78,80%**		**78,82%**		**78,85%**		**78,85%**								**Hasil**	**Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**	**75%**	**78,80%**		**78,82%**		**78,85%**		**78,85%**		
		1	06	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Keluaran	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	1 Unit	5.000.000					1 Unit	5.000.000	1	06	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Keluaran	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	1 Unit	5.000.000,00					1 Unit	5.000.000	
		1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	1 Paket	15.950.000	2 paket /94 Stel	51.700.000	2 paket /94 Stel	47.000.000	5 Paket	114.650.000	1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	1 Paket	15.950.000,00	2 paket /94 Stel	51.700.000	2 paket /94 Stel	47.000.000	5 Paket	114.650.000	
		1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	8 Orang	100.000.000	20 Orang	200.000.000	20 Orang	200.000.000	48 Orang	500.000.000	1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	8 Orang	100.000.000,00	20 Orang	200.000.000	20 Orang	200.000.000	48 Orang	500.000.000	
		1	06	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Keluaran**	**Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**541.534.000**	**100%**	**618.157.400**	**100%**	**649.973.140**	**100%**	**1.809.664.540**	1	06	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Keluaran**	**Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**541.534.000,00**	**100%**	**618.157.400**	**100%**	**649.973.140**	**100%**	**1.809.664.540**	
								Hasil	**Persentase pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**								**Hasil**	**Persentase pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
		1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	1 Paket	8.470.000	1 paket	9.317.000	3 Paket	27.787.000	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	8.470.000	1 paket	9.317.000	3 Paket	27.787.000	
		1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	58.410.000	2 Paket	64.251.000	2 Paket	70.676.100	6 Paket	193.337.100	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	58.410.000,00	2 Paket	64.251.000	2 Paket	70.676.100	6 Paket	193.337.100	
		1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	15.400.000	1 Paket	16.940.000	1 Paket	18.634.000	3 Paket	50.974.000	1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	15.400.000,00	1 Paket	16.940.000	1 Paket	18.634.000	3 Paket	50.974.000	
		1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	2 Paket	2 Paket	153.264.000	2 Paket	168.590.400	2 Paket	185.449.440	6 Paket	507.303.840	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	2 Paket	2 Paket	153.264.000,00	2 Paket	168.590.400	2 Paket	185.449.440	6 Paket	507.303.840	
		1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	48.700.000	1 Paket	53.570.000	1 Paket	58.927.000	3 Paket	161.197.000	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	48.700.000,00	1 Paket	53.570.000	1 Paket	58.927.000	3 Paket	161.197.000	
		1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dok	1 Dok	5.760.000	1 Dok	6.336.000	1 Dok	6.969.600	3 Dok	19.065.600	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dok	1 Dok	5.760.000,00	1 Dok	6.336.000	1 Dok	6.969.600	3 Dok	19.065.600	
		1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	300.000.000	36 Laporan	850.000.000	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	300.000.000	36 Laporan	850.000.000	
		1	06	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Keluaran**	**Jenis barang milik daerah**	-	**5 Jenis**	**15.876.449.100**	**5 Jenis**	**406.604.907**	**5 Jenis**	**410.309.400**	**15 Jenis**	**16.693.363.407**	1	06	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Keluaran**	**Jenis barang milik daerah**	-	**5 Jenis**	**15.876.449.100,00**	**5 Jenis**	**406.604.907**	**5 Jenis**	**410.309.400**	**15 Jenis**	**16.693.363.407**	

Tujuan	Sasaran	Sebelum Perubahan (Kepmendagri 900-1317 Tahun 2023)																		Setelah Perubahan (Kepmendagri 900-3406 Tahun 2024)																		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab
		Kode					Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Kode					Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		
											Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp											Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
								Hasil	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%								Hasil	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		
		1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Keluaran	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	1 Unit	300.000.000	4 Unit	140.000.000	4 Unit	140.000.000	9 Unit	580.000.000	1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	1 Unit	300.000.000,00	4 Unit	140.000.000	4 Unit	140.000.000	9 Unit	580.000.000	
		1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Keluaran	Jumlah paket mebel yang disediakan	-	112 Unit	154.102.100	7 Unit	10.500.000	6 Unit	11.309.400	125 Unit	175.911.500	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Keluaran	Jumlah paket mebel yang disediakan	-	112 Unit	154.102.100,00	7 Unit	10.500.000	6 Unit	11.309.400	125 Unit	175.911.500	
		1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran	Jumlah unit peralatan atau mesin lainnya yang disediakan	-	28 Unit	247.347.000	5 Unit	61.104.907	4 Unit	16.000.000	37 Unit	324.451.907	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran	Jumlah unit peralatan atau mesin lainnya yang disediakan	-	28 Unit	247.347.000,00	5 Unit	61.104.907	4 Unit	16.000.000	37 Unit	324.451.907	
		1	06	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lain yang disediakan	-	3 Unit	15.170.000.000	2 Unit	195.000.000	1 unit	243.000.000	6 unit	15.608.000.000	1	06	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lain yang disediakan	-	3 Unit	15.170.000.000,00	2 Unit	195.000.000	1 unit	243.000.000	6 unit	15.608.000.000	
		1	06	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	1 Unit	5.000.000	-	-	-	-	1 Unit	5.000.000	1	06	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	1 Unit	5.000.000,00	-	-	-	-	1 Unit	5.000.000	
		1	06	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Keluaran**	**Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**220.683.000**	**100%**	**250.500.000**	**100%**	**259.000.000**	**100%**	**730.183.000**	1	06	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Keluaran**	**Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**220.683.000,00**	**100%**	**250.500.000**	**100%**	**259.000.000**	**100%**	**730.183.000**	
								Hasil	**Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**								**Hasil**	**Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
		1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	3.500.000	12 laporan	4.000.000	36 Laporan	10.500.000	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	12 Laporan	3.500.000	12 laporan	4.000.000	36 Laporan	10.500.000	
		1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	51.600.000	12 Laporan	65.000.000	12 Laporan	70.000.000	36 Laporan	186.600.000	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	51.600.000,00	12 Laporan	65.000.000	12 Laporan	70.000.000	36 Laporan	186.600.000	
		1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran	Jumlah laporan penyediaan jasa layanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	166.083.000	12 laporan	182.000.000	12 laporan	185.000.000	36 laporan	533.083.000	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran	Jumlah laporan penyediaan jasa layanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	166.083.000,00	12 laporan	182.000.000	12 laporan	185.000.000	36 laporan	533.083.000	
		1	06	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Keluaran**	**Barang milik daerah dalam kondisi baik**	**5 Jenis**	**6 Jenis**	**620.645.000**	**6 Jenis**	**2.273.500.000**	**6 Jenis**	**789.000.000**	**18 Jenis**	**3.683.145.000**	1	06	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Keluaran**	**Barang milik daerah dalam kondisi baik**	**5 Jenis**	**6 Jenis**	**620.645.000,00**	**6 Jenis**	**2.273.500.000**	**6 Jenis**	**789.000.000**	**18 Jenis**	**3.683.145.000**	
								Hasil	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**								**Hasil**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
		1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 unit	55.000.000	2 Unit	155.000.000	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	2 Unit	50.000.000	2 unit	55.000.000	2 Unit	155.000.000	
		1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.	24 Unit	21 Unit	229.405.000	22 Unit	230.000.000	26 unit	235.000.000	26 Unit	694.405.000	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.	24 Unit	21 Unit	229.405.000,00	22 Unit	230.000.000	26 unit	235.000.000	26 Unit	694.405.000	
		1	06	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebeleur	Keluaran	Jumlah mebel yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	3.500.000	10 unit	3.500.000	10 unit	4.000.000	10 Unit	11.000.000	1	06	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Keluaran	Jumlah mebel yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	3.500.000,00	10 unit	3.500.000	10 unit	4.000.000	10 Unit	11.000.000	
		1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 Unit	47 Unit	37.740.000	66 Unit	40.000.000	71 Unit	45.000.000	71 Unit	122.740.000	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 Unit	47 Unit	37.740.000,00	66 Unit	40.000.000	71 Unit	45.000.000	71 Unit	122.740.000	
		1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan rehabilitasi	3 Unit	2 Unit	200.000.000	3 Unit	1.800.000.000	3 Unit	300.000.000	3 Unit	2.300.000.000	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 Unit	2 Unit	200.000.000,00	3 Unit	1.800.000.000	3 Unit	300.000.000	3 Unit	2.300.000.000	
		1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	-	2 Unit	100.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	3 Unit	400.000.000	1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	-	2 Unit	100.000.000,00	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	3 Unit	400.000.000	
URUSAN SOSIAL																																									
		1	**06**	**02**			**Program Pemberdayaan Sosial**	**Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial**		**100%**	**100%**	**652.612.350**	**100%**	**731.873.585**	**100%**	**806.560.944**	**100%**	**2.191.046.879**	**1**	**06**	**02**			**Program Pemberdayaan Sosial**	**Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial**		**100%**	**100%**	**652.612.350,00**	**100%**	**731.873.585**	**100%**	**806.560.944**	**100%**	**2.191.046.879**	
		1	06	02	2.03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Keluaran**	**Jumlah PSKS yang aktif**	**159 PSKS**	**165 PSKS**	**652.612.350**	**165 PSKS**	**731.873.585**	**165 PSKS**	**806.560.944**	**165 PSKS**	**2.191.046.879**	1	06	02	2.03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Keluaran**	**Jumlah PSKS yang aktif**	**159 PSKS**	**165 PSKS**	**652.612.350,00**	**165 PSKS**	**731.873.585**	**165 PSKS**	**806.560.944**	**165 PSKS**	**2.191.046.879**	
								Hasil	**Keakuratan data**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**								**Hasil**	**Keakuratan data**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
		1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah orang yang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	54 Orang	49 Orang	56.570.350	49 Orang	57.200.000	49 Orang	62.920.000	49 Orang	176.690.350	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah orang yang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	54 Orang	49 Orang	56.570.350,00	49 Orang	57.200.000	49 Orang	62.920.000	49 Orang	176.690.350	
		1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	5 Orang	127.000.000	5 Orang	82.500.000	5 Orang	90.750.000	5 Orang	300.250.000	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	5 Orang	127.000.000,00	5 Orang	82.500.000	5 Orang	90.750.000	5 Orang	300.250.000	
		1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	18 Keluarga	17 Keluarga	190.000.000	17 Keluarga	271.227.385	17 Keluarga	298.350.124	17 Keluarga	759.577.509	1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	18 Keluarga	17 Keluarga	190.000.000,00	17 Keluarga	271.227.385	17 Keluarga	298.350.124	17 Keluarga	759.577.509	
		1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	6 Lembaga	6 Lembaga	169.042.000	6 Lembaga	185.946.200	6 Lembaga	204.540.820	6 Lembaga	559.529.020	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	6 Lembaga	6 Lembaga	169.042.000,00	6 Lembaga	185.946.200	6 Lembaga	204.540.820	6 Lembaga	559.529.020	

Tujuan	Sasaran	Sebelum Perubahan (Kepmendagri 900-1317 Tahun 2023)															Setelah Perubahan (Kepmendagri 900-3406 Tahun 2024															Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab
		Kode					Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Kode					Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		
											Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp										Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
		1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Keluaran	Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan sumberdaya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) kewenangan kabupaten/kota	n/a	1 Sertifikat	110.000.000	1 Sertifikat	135.000.000	1 sertifikat	150.000.000	1 Sertifikat	395.000.000	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Keluaran	Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan sumberdaya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) kewenangan kabupaten/kota	n/a	1 Sertifikat	110.000.000,00	1 Sertifikat	135.000.000	1 sertifikat	150.000.000	1 Sertifikat	395.000.000	
		1	**06**	**03**			**Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**	**1. Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Daerah Asalnya**		**100%**	**100%**	**54.477.500**	**100%**	**59.925.250**	**100%**	**65.917.775**	**100%**	**180.320.525**	**1**	**06**	**03**			**Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**	**1. Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Daerah Asalnya**		**100%**	**100%**	**54.477.500,00**	**100%**	**59.925.250**	**100%**	**65.917.775**	**100%**	**180.320.525**	
		1	06	03	2.01		**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**Keluaran**	**Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**12 Orang**	**12 Orang**	**54.477.500**	**12 Orang**	**59.925.250**	**12 orang**	**65.917.775**	**36 Orang**	**180.320.525**	1	06	03	2.01		**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**Keluaran**	**Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**12 Orang**	**12 Orang**	**54.477.500,00**	**12 Orang**	**59.925.250**	**12 orang**	**65.917.775**	**36 Orang**	**180.320.525**	
								Hasil	**Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**								**Hasil**	**Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
		1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Keluaran	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	12 Orang	12 Orang	54.477.500	12 Orang	59.925.250	12 orang	65.917.775	36 Orang	180.320.525	1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Keluaran	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/ Kota	12 Orang	12 Orang	54.477.500,00	12 Orang	59.925.250	12 orang	65.917.775	36 Orang	180.320.525	
	.....	**1**	**06**	**04**			**Program Rehabilitasi Sosial**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial**		**100%**	**100%**	**1.242.015.740**		**1.356.834.490**		**1.474.684.425**	**100%**	**4.073.534.655**	**1**	**06**	**04**			**Program Rehabilitasi Sosial**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial**		**100%**	**100%**	**1.242.015.740,00**	**100%**	**1.356.834.490**	**100%**	**1.474.684.425**	**100%**	**4.073.534.655**	
		1	06	04	2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Keluaran**	**Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan yang mendapatkan rehabilitasi sosial**	**105 Orang**	**105 Orang**	**1.160.008.800**	**105 Orang**	**1.267.125.450**	**105 Orang**	**1.376.503.075**	**105 Orang**	**3.803.637.325**	1	06	04	2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Keluaran**	**Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan yang mendapatkan rehabilitasi sosial**	**105 Orang**	**105 Orang**	**1.160.008.800,00**	**105 Orang**	**1.267.125.450**	**105 Orang**	**1.376.503.075**	**105 Orang**	**3.803.637.325**	
								Hasil	**Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**								**Hasil**	**Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
		1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Keluaran	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	105 Orang	105 Orang	210.666.800	105 Orang	217.349.200	105 orang	217.349.200	105 orang	645.365.200	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Keluaran	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	105 Orang	105 Orang	210.666.800,00	105 Orang	217.349.200	105 orang	217.349.200	105 orang	645.365.200	
		1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Keluaran	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	-	105 Orang	57.822.500	105 Orang	63.604.750	105 orang	69.965.225	105 orang	191.392.475	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Keluaran	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	-	105 Orang	57.822.500,00	105 Orang	63.604.750	105 orang	69.965.225	105 orang	191.392.475	
		1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Keluaran	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/ Kota	-	21 Orang	70.000.000	21 Orang	77.000.000	21 Orang	84.700.000	63 Orang	231.700.000	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Keluaran	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/ Kota	-	21 Orang	70.000.000,00	21 Orang	77.000.000	21 Orang	84.700.000	63 Orang	231.700.000	

Tujuan	Sasaran	Sebelum Perubahan (Kepmendagri 900-1317 Tahun 2023)																				Setelah Perubahan (Kepmendagri 900-3406 Tahun 2024)																				Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab
		Kode					Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Kode					Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
											Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp										Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
		1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Keluaran	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	105 Orang	105 orang	441.097.000	105 orang	485.206.750	105 orang	533.727.425	105 orang	1.460.031.175	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Keluaran	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	105 Orang	105 orang	441.097.000,00	105 orang	485.206.750	105 orang	533.727.425	105 orang	1.460.031.175	
		1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Keluaran	Jumlah peserta bimbingan fisik mental spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	32 Orang	30 Orang	50.000.000	30 Orang	60.000.000	30 Orang	70.000.000	90 Orang	180.000.000	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Keluaran	Jumlah peserta bimbingan fisik mental spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	32 Orang	30 Orang	50.000.000,00	30 Orang	60.000.000	30 Orang	70.000.000	90 Orang	180.000.000	
		1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Keluaran	Jumlah peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	-	10 Orang	5.000.000	10 Orang	6.000.000	10 Orang	7.000.000	30 Orang	18.000.000	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Keluaran	Jumlah peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	-	10 Orang	5.000.000,00	10 Orang	6.000.000	10 Orang	7.000.000	30 Orang	18.000.000	
		1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Keluaran	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas kewenangan Kabupaten/Kota	-	2 orang	4.590.000	12 Orang	5.049.000	12 orang	5.553.900	36 Orang	15.192.900	1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Keluaran	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas kewenangan Kabupaten/Kota	-	12 orang	4.590.000,00	12 Orang	5.049.000	12 orang	5.553.900	36 Orang	15.192.900	
		1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kewenangan Kabupaten/Kota	-	7 Orang	3.865.000	7 Orang	4.251.500	7 Orang	4.676.650	21 Orang	12.793.150	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kewenangan Kabupaten/Kota	-	7 Orang	3.865.000,00	7 Orang	4.251.500	7 Orang	4.676.650	21 Orang	12.793.150	
		1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan kewenangan Kabupaten/Kota	-	105 orang	184.750.000	105 orang	203.225.000	105 orang	223.547.500	105 orang	611.522.500	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan kewenangan Kabupaten/Kota	-	105 orang	184.750.000,00	105 orang	203.225.000	105 orang	223.547.500	105 orang	611.522.500	
		1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	-	12 orang	75.662.500	12 Orang	83.228.750	12 orang	91.551.625	36 Orang	250.442.875	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	-	12 orang	75.662.500,00	12 Orang	83.228.750	12 orang	91.551.625	36 Orang	250.442.875	
		1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	-	12 orang	7.715.000	12 Orang	8.486.500	12 orang	9.335.150	36 Orang	25.536.650	1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	-	12 orang	7.715.000,00	12 Orang	8.486.500	12 orang	9.335.150	36 Orang	25.536.650	
		1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	-	12 orang	48.840.000	12 Orang	53.724.000	12 orang	59.096.400	36 Orang	161.660.400	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	-	12 orang	48.840.000,00	12 Orang	53.724.000	12 orang	59.096.400	36 Orang	161.660.400	
		1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial**	**Keluaran**	**Persentase PMKS yang menerima layanan rehabilitasi sosial**	**100%**	**100%**	**82.006.940**	**100%**	**89.709.040**	**100%**	**98.181.350**	**100%**	**269.897.330**	**1**	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial**	**Keluaran**	**Persentase PMKS yang menerima layanan rehabilitasi sosial**	**100%**	**100%**	**82.006.940,00**	**100%**	**89.709.040**	**100%**	**98.181.350**	**100%**	**269.897.330**	
								Hasil	**Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**								**Hasil**	**Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
		1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	20 Orang	2.897.500	30 Orang	2.897.500	30 Orang	2.897.500	80 Orang	8.692.500	1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	20 Orang	2.897.500,00	20 Orang	2.897.500	30 Orang	2.897.500	80 Orang	8.692.500	
		1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Keluaran	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di luar panti kewenangan Kabupaten/ Kota	12 Orang	5 Orang	10.500.000	5 Orang	11.550.000	5 Orang	12.705.000	15 Orang	34.755.000	1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Keluaran	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di luar panti kewenangan Kabupaten/ Kota	12 Orang	5 Orang	10.500.000,00	1%	11.550.000	5 Orang	12.705.000	15 Orang	34.755.000	
		1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Keluaran	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	15 Orang	33.921.000	15 Orang	37.313.100	15 Orang	41.044.410	45 Orang	112.278.510	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Keluaran	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	15 Orang	33.921.000,00	15 Orang	37.313.100	15 Orang	41.044.410	45 Orang	112.278.510	
		1	06	04	2.02	0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Keluaran	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	-	10 Orang	2.088.440	10 Orang	2.088.440	10 Orang	2.088.440	30 Orang	6.265.320	1	06	04	2.02	0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Keluaran	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	-	10 Orang	2.088.440,00	10 Orang	2.088.440	10 Orang	2.088.440	30 Orang	6.265.320	
		1	06	04	2.02	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Keluaran	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	-	2 Orang	32.600.000	2 Orang	35.860.000	2 Orang	39.446.000	6 Orang	107.906.000	1	06	04	2.02	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Keluaran	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	-	2 Orang	32.600.000,00	2 Orang	35.860.000	2 Orang	39.446.000	6 Orang	107.906.000	
.....		**1**	**06**	**05**			**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial**		**97,25%**	**100%**	**1.105.194.750**	**100%**	**1.252.125.480**	**100%**	**1.442.338.028**	**100%**	**3.799.658.258**	**1**	**06**	**05**			**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial**		**97,25%**	**100%**	**1.105.194.750,00**	**100%**	**1.252.125.480**	**100%**	**1.442.338.028**	**100%**	**3.799.658.258**	
		1	06	05	2.01		**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Keluaran**	**Terpenuhinya pemeliharaan anak terlantar**	-	**7 Orang**	**130.622.500**	**7 Orang**	**143.684.750**	**7 Orang**	**158.053.225**	**7 Orang**	**432.360.475**	1	06	05	2.01		**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Keluaran**	**Terpenuhinya pemeliharaan anak terlantar**	-	**7 Orang**	**130.622.500,00**	**7 Orang**	**143.684.750**	**7 Orang**	**158.053.225**	**7 Orang**	**432.360.475**	
								Hasil	**Terpeliharanya anak terlantar**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**								**Hasil**	**Terpeliharanya anak terlantar**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
		1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Keluaran	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten /Kota	-	32 Orang	63.737.500	32 Orang	70.111.250	32 Orang	77.122.375	32 Orang	210.971.125	1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Keluaran	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten /Kota	-	32 Orang	63.737.500,00	32 Orang	70.111.250	32 Orang	77.122.375	32 Orang	210.971.125	

Tujuan	Sasaran	Sebelum Perubahan (Kepmendagri 900-1317 Tahun 2023)																				Setelah Perubahan (Kepmendagri 900-3406 Tahun 2024)																				Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab
		Kode					Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Kode					Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		
											Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp										Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
		1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Keluaran	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten /Kota	-	8 Orang	57.420.000	8 Orang	63.162.000	8 Orang	69.478.200	24 Orang	190.060.200	1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Keluaran	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten /Kota	-	8 Orang	57.420.000,00	8 Orang	63.162.000	8 Orang	69.478.200	24 Orang	190.060.200	
		1	06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Keluaran	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten /Kota	-	8 Orang	9.465.000	8 Orang	10.411.500	8 Orang	11.452.650	24 Orang	31.329.150	1	06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Keluaran	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten /Kota	-	8 Orang	9.465.000,00	8 Orang	10.411.500	8 Orang	11.452.650	24 Orang	31.329.150	
		1	06	05	2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Keluaran**	**Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi**	**100%**	**100%**	**974.572.250**	**100%**	**1.108.440.730**	**100%**	**1.284.284.803**	**100%**	**3.367.297.783**	1	06	05	2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Keluaran**	**Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi**	**100%**	**100%**	**974.572.250,00**	**100%**	**1.108.440.730**	**100%**	**1.284.284.803**	**100%**	**3.367.297.783**	
								Hasil	**Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**									**Hasil**	**Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**	
		1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/ Kota	8682 Keluarga	8740 Keluarga	557.807.950	8740 Keluarga	650.000.000	8740 Keluarga	780.000.000	8740 Keluarga	1.987.807.950	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/ Kota	8682 Keluarga	8740 Keluarga	557.807.950,00	8740 Keluarga	650.000.000	8740 Keluarga	780.000.000	8740 Keluarga	1.987.807.950	
		1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluaran	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	-	10 Keluarga	316.764.300	10 Keluarga	348.440.730	10 Keluarga	383.284.803	30 Keluarga	1.048.489.833	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluaran	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	-	10 Keluarga	316.764.300,00	10 Keluarga	348.440.730	10 Keluarga	383.284.803	30 Keluarga	1.048.489.833	
		1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Keluaran	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota	-	18 Orang	100.000.000	20 Orang	110.000.000	18 Orang	121.000.000	56 Orang	331.000.000	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Keluaran	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota	-	18 Orang	100.000.000,00	20 Orang	110.000.000	18 Orang	121.000.000	56 Orang	331.000.000	
		1	**06**	**06**			**Program Penanganan Bencana**	**Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana**		**100%**	**100%**	**633.312.990**	**100%**	**696.644.289**	**100%**	**765.308.718**	**100%**	**2.095.265.997**	**1**	**06**	**06**			**Program Penanganan Bencana**	**Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana**		**100%**	**100%**	**633.312.990,00**	**100%**	**696.644.289**	**100%**	**765.308.718**	**100%**	**2.095.265.997**	
		1	06	06	2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota**	**Keluaran**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial**	**n/a**	**100%**	**93.377.500**	**100%**	**97.715.250**	**100%**	**102.486.775**	**100%**	**293.579.525**	1	06	06	2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota**	**Keluaran**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial**	**n/a**	**100%**	**93.377.500,00**	**100%**	**97.715.250**	**100%**	**102.486.775**	**100%**	**293.579.525**	
								Hasil	**Terlayaninya korban bencana**	**n/a**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**									**Hasil**	**Terlayaninya korban bencana**	**n/a**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**	
		1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Keluaran	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kabupaten/ Kota	n/a	40 orang	50.000.000	40 orang	50.000.000	40 orang	50.000.000	120 Orang	150.000.000	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Keluaran	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kabupaten/ Kota	n/a	40 orang	50.000.000,00	40 orang	50.000.000	40 orang	50.000.000	120 Orang	150.000.000	
		1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	40 orang	5.000.000	40 orang	5.500.000	40 orang	6.000.000	120 Orang	16.500.000	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	40 orang	5.000.000,00	40 orang	5.500.000	40 orang	6.000.000	120 Orang	16.500.000	
		1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Keluaran	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	1 Unit	3.826.000	3 Unit	4.000.000	5 Unit	5.000.000	5 Unit	12.826.000	1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Keluaran	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	1 Unit	3.826.000,00	3 Unit	4.000.000	5 Unit	5.000.000	5 Unit	12.826.000	
		1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	40 orang	3.826.000	40 orang	4.000.000	40 orang	5.000.000	120 Orang	12.826.000	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	40 orang	3.826.000,00	40 orang	4.000.000	40 orang	5.000.000	120 Orang	12.826.000	
		1	06	06	2.02	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Keluaran	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	40 orang	30.725.500	40 orang	34.215.250	40 orang	36.486.775	120 Orang	101.427.525	1	06	06	2.02	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Keluaran	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	40 orang	30.725.500,00	40 orang	34.215.250	40 orang	36.486.775	120 Orang	101.427.525	
		1	06	06	2.02		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota**	**Keluaran**	**Korban bencana yang menerima bantuan sosial**	**100%**	**100%**	**539.935.490**	**100%**	**598.929.039**	**100%**	**662.821.943**	**100%**	**1.801.686.472**	1	06	06	2.02		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota**	**Keluaran**	**Korban bencana yang menerima bantuan sosial**	**100%**	**100%**	**539.935.490,00**	**100%**	**598.929.039**	**100%**	**662.821.943**	**100%**	**1.801.686.472**	
								Hasil	**Terlayaninya korban bencana**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**									**Hasil**	**Terlayaninya korban bencana**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**	
		1	**06**	**06**	2.02	0001	Koordinasi, Sosilisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Keluaran	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	3 Kampung	50.000.000	3 Kampung	60.000.000	3 Kampung	70.000.000	3 Kampung	180.000.000	**1**	**06**	**06**	2.02	0001	Koordinasi, Sosilisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Keluaran	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	3 Kampung	50.000.000,00	3 Kampung	60.000.000	3 Kampung	70.000.000	3 Kampung	180.000.000	
		1	**06**	**06**	2.02	0002	Koordinasi, Sosilisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Keluaran	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	45 Orang	45 Orang	489.935.490	45 Orang	538.929.039	45 Orang	592.821.943	45 Orang	1.621.686.472	**1**	**06**	**06**	2.02	0002	Koordinasi, Sosilisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Keluaran	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	45 Orang	45 Orang	489.935.490,00	45 Orang	538.929.039	45 Orang	592.821.943	45 Orang	1.621.686.472	
	.....	**1**	**06**	**07**			**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**Taman Makam Pahlawan yang tertata**		**100%**	**100%**	**244.600.000**	**100%**	**264.060.000**	**100%**	**294.466.000**	**100%**	**803.126.000**	**1**	**06**	**07**			**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**Taman Makam Pahlawan yang tertata**		**100%**	**100%**	**244.600.000,00**	**100%**	**264.060.000**	**100%**	**294.466.000**	**100%**	**803.126.000**	
		1	**06**	**07**	2.01		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota**	**Keluaran**	**Terlaksananya pengeloalaan Taman Makam Pahlawan**	**100%**	**100%**	**244.600.000**	**100%**	**264.060.000**	**100%**	**294.466.000**	**100%**	**803.126.000**	**1**	**06**	**07**	2.01		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota**	**Keluaran**	**Terlaksananya pengeloalaan Taman Makam Pahlawan**	**100%**	**100%**	**244.600.000,00**	**100%**	**264.060.000**	**100%**	**294.466.000**	**100%**	**803.126.000**	
								Hasil	**Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**									**Hasil**	**Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**	
		1	**06**	**07**	2.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	1 Dok	150.000.000	1 Dok	160.000.000	1 Dok	180.000.000	3 Dok	490.000.000	**1**	**06**	**07**	2.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	1 Dok	150.000.000,00	1 Dok	160.000.000	1 Dok	180.000.000	3 Dok	490.000.000	
		1	**06**	**07**	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada taman makam pahlawan kabupaten/kota	54 Makam	55 Makam	94.600.000	55 Makam	104.060.000	55 Makam	114.466.000	55 Makam	313.126.000	**1**	**06**	**07**	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada taman makam pahlawan kabupaten/kota	54 Makam	55 Makam	94.600.000,00	55 Makam	104.060.000	55 Makam	114.466.000	55 Makam	313.126.000	

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tujuan	Sasaran	Sebelum Perubahan (Kepmendagri 900-1317 Tahun 2023)															Setelah Perubahan (Kepmendagri 900-3406 Tahun 2024)															Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab
		Kode					Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Kode					Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		
											Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp										Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
1.2. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan								Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		53,42%	53,43	611.365.362	53,44	671.371.898	53,45	737.056.088	53,45	2.019.793.348							Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		53,42%	53,43	611.365.362,00	53,44	671.371.898	53,45	737.056.088	53,45	2.019.793.348	
	1.2.1 Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan							Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE)		-	Pratama	611.365.362	Pratama	671.371.898	Madya	737.056.088	Madya	2.019.793.348							Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE)		-	Pratama	611.365.362,00	Pratama	671.371.898	Madya	737.056.088	Madya	2.019.793.348	
		2	**08**	**02**			**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Persentase ARG pada belanja langsung APBD**		**35,75%**	**36,00%**	**562.727.520**	**36,25%**	**617.870.272**	**36,50%**	**678.204.299**	**36,50%**	**1.858.802.091**	**2**	**08**	**02**			**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Persentase ARG pada belanja langsung APBD**		**35,75%**	**36,00%**	**562.727.520,00**	**36,25%**	**617.870.272**	**36,50%**	**678.204.299**	**36,50%**	**1.858.802.091**	
		2	08	02	2.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**Keluaran**	**Lembaga pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG**	**NA**	**10 PD**	**44.879.100**	**10 PD**	**48.237.060**	**15 PD**	**51.607.766**	**35 PD**	**144.723.926**	2	08	02	2.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**Keluaran**	**Lembaga pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG**	**NA**	**10 PD**	**44.879.100,00**	**10 PD**	**48.237.060**	**15 PD**	**51.607.766**	**35 PD**	**144.723.926**	
								Hasil	**Terlaksananya kebijakan PUG**	**NA**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**									**Hasil**	**Terlaksananya kebijakan PUG**	**NA**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**	
		2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Keluaran	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pengaurustamaan gender PUG kewenangan kabupaten/kota	NA	1 Dok	19.930.000	1 Dok	20.793.050	1 Dok	21.419.355	3 dok	62.142.405	2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Keluaran	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pengaurustamaan gender PUG kewenangan kabupaten/kota	NA	1 Dok	19.930.000,00	1 Dok	20.793.050	1 Dok	21.419.355	3 dok	62.142.405	
		2	08	02	2.01	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Keluaran	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG) kewenangan kabupaten/kota	NA	35 Perangkat Daerah	24.949.100					35 Perangkat Daerah	24.949.100	2	08	02	2.01	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Keluaran	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG) kewenangan kabupaten/kota	NA	35 Perangkat Daerah	24.949.100,00					35 Perangkat Daerah	24.949.100	
		2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggaraan PUG				40 Orang	27.444.010	40 Orang	30.188.411	80 Orang	57.632.421	2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggaraan PUG				40 Orang	27.444.010	40 Orang	30.188.411	80 Orang	57.632.421	
		2	08	02	2.02		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**Keluaran**	**Terfasilitasinya organisasi perempuan**	**19 Organisasi**	**19 Organisasi**	**459.346.905**	**19 Organisasi**	**505.281.545**	**19 Organisasi**	**555.809.700**	**19 Organisasi**	**1.520.438.150**	2	08	02	2.02		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**Keluaran**	**Terfasilitasinya organisasi perempuan**	**19 Organisasi**	**19 Organisasi**	**459.346.905,00**	**19 Organisasi**	**505.281.545**	**19 Organisasi**	**555.809.700**	**19 Organisasi**	**1.520.438.150**	
								Hasil	**Meningkatnya peran perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**									**Hasil**	**Meningkatnya peran perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**	
		2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Keluaran	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	1 Dok	1 Dok	29.402.450	1 Dok	32.342.645	1 Dok	35.576.910	3 dok	97.322.005	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Keluaran	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	1 Dok	1 Dok	29.402.450,00	1 Dok	32.342.645	1 Dok	35.576.910	3 dok	97.322.005	
		2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Keluaran	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	19 Organisasi	21 Organisasi	429.944.455	21 Organisasi	472.938.900	21 organisasi	520.232.790	19 Organisasi	1.423.116.145	2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Keluaran	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	19 Organisasi	21 Organisasi	429.944.455,00	21 Organisasi	472.938.900	21 organisasi	520.232.790	19 Organisasi	1.423.116.145	
		2	08	02	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Keluaran**	**Terfasilitasinya Forum Puspa Kabupaten Belitung**	**1 Lembaga**	**1 Lembaga**	**58.501.515**	**1 Lembaga**	**64.351.667**	**1 Lembaga**	**70.786.833**	**1 Lembaga**	**193.640.015**	2	08	02	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Keluaran**	**Terfasilitasinya Forum Puspa Kabupaten Belitung**	**1 Lembaga**	**1 Lembaga**	**58.501.515,00**	**1 Lembaga**	**64.351.667**	**1 Lembaga**	**70.786.833**	**1 Lembaga**	**193.640.015**	
								Hasil	**Meningkatnya layanan pemberdayaan perempuan dan anak**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**									**Hasil**	**Meningkatnya layanan pemberdayaan perempuan dan anak**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**	
		2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan pendampingan	1 Lembaga	1 Lembaga	30.941.515	1 Lembaga	34.035.667	1 lembaga	37.439.233	1 Lembaga	102.416.415	2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan pendampingan	1 Lembaga	1 Lembaga	30.941.515,00	1 Lembaga	34.035.667	1 lembaga	37.439.233	1 Lembaga	102.416.415	
		2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	-	30 orang	13.160.000	30 orang	14.476.000	30 orang	15.923.600	30 Orang	43.559.600	2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	-	30 orang	13.160.000,00	30 orang	14.476.000	30 orang	15.923.600	30 Orang	43.559.600	
		2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	keluaran	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	1 dok	14.400.000	1 dok	15.840.000	1 dok	17.424.000	3 dok	47.664.000	2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	keluaran	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	1 dok	14.400.000,00	1 dok	15.840.000	1 dok	17.424.000	3 dok	47.664.000	
1.3. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan								Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak		3,25	3,20	832.929.157	3,18	914.972.073	3,16	1.005.219.280	3,16	2.753.120.510							Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak		3,25	3,20	832.929.158,00	3,18	914.972.073	3,16	1.005.219.280	3,16	2.753.120.511	
	1.3.1 Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan							Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak		3,25	3,20	832.929.157	3,18	914.972.073	3,16	1.005.219.280	3,16	2.753.120.510							Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak		3,25	3,20	832.929.158,00	3,18	914.972.073	3,16	1.005.219.280	3,16	2.753.120.511	
	.....																																	
		2	**08**	**03**			**Program Perlindungan Perempuan**	**Persentase layanan perlindungan perempuan**		**100%**	**100%**	**300.000.000**	**100%**	**327.000.000**	**100%**	**362.700.000**	**100%**	**989.700.000**	**2**	**08**	**03**			**Program Perlindungan Perempuan**	**Persentase layanan perlindungan perempuan**		**100%**	**100%**	**300.000.000,00**	**100%**	**327.000.000**	**100%**	**362.700.000**	**100%**	**989.700.000**	

Tujuan	Sasaran	Sebelum Perubahan (Kepmendagri 900-1317 Tahun 2023)																		Setelah Perubahan (Kepmendagri 900-3406 Tahun 2024)														Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab
		Kode					Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Kode					Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		
											Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp										Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
		2	08	03	2.01		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah/ Kabupaten**	**Keluaran**	**Terlaksananya pelayanan perlindungan perempuan dan anak**	**100%**	**100%**	**175.000.000**	**100%**	**192.500.000**	**100%**	**211.750.000**	**100%**	**579.250.000**	2	08	03	2.01		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah/ Kabupaten**	**Keluaran**	**Terlaksananya pelayanan perlindungan perempuan dan anak**	**100%**	**100%**	**74.000.000,00**	**100%**	**74.000.000**	**100%**	**75.000.000**	**100%**	**223.000.000**	
								Hasil	**Persentase penanganan kasus**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**									**Hasil**	**Persentase penanganan kasus**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**	
		2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dok	1 dok	175.000.000	1 dok	192.500.000	1 dok	211.750.000	3 dok	579.250.000	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dok	1 dok	74.000.000,00	1 dok	74.000.000	1 dok	75.000.000	3 dok	223.000.000	
		2	08	03	2.02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Keluaran**	**Jumlah lembaga yang terfasilitasi**	**3 Lembaga**	**3 Lembaga**	**125.000.000**	**3 Lembaga**	**134.500.000**	**3 Lembaga**	**150.950.000**	**3 Lembaga**	**410.450.000**	2	08	03	2.02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Keluaran**	**Jumlah lembaga yang terfasilitasi**	**3 Lembaga**	**3 Lembaga**	**226.000.000,00**	**3 Lembaga**	**253.000.000**	**3 Lembaga**	**287.700.000**	**3 Lembaga**	**766.700.000**	
								Hasil	**Meningkatnya layanan perlindungan perempuan**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**									**Hasil**	**Meningkatnya layanan perlindungan perempuan**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**	
																			2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan	40 Orang	22 Orang	-	21 Orang	10.000.000	20 Orang	10.000.000	77 Orang	20.000.000	
		2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/ Kota	11 Layanan	11 Layanan	125.000.000	11 Layanan	134.500.000	11 Layanan	150.950.000	11 Layanan	410.450.000	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/ Kota	11 Layanan	11 Layanan	226.000.000,00	11 Layanan	243.000.000	11 Layanan	277.700.000	11 Layanan	746.700.000	APBD & DAK NF PPA
1.2. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan								Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		53,42%	53,43		53,44		53,45		53,45	-								Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		53,42%	53,43		53,44		53,45		53,45	-	
	1.2.1 Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan							Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE)		-	Pratama		Pratama		Madya		Madya	-								Level Anugerah Parahita Ekapraya (APE)		-	Pratama		Pratama		Madya		Madya	-	
		2	**08**	**04**			**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Persentase keluarga yang terlayani**		**100%**	**100%**	**43.529.157**	**100%**	**46.632.073**	**100%**	**50.045.280**	**100%**	**140.206.510**	**2**	**08**	**04**			**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Persentase keluarga yang terlayani**		**100%**	**100%**	**43.529.158,00**	**100%**	**46.632.073**	**100%**	**50.045.280**	**100%**	**140.206.511**	
		2	08	04	2.02	1	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Keluaran**	**Lembaga keluarga yang dibina**	**1 Lembaga**	**1 Lembaga**	**43.529.157**	**1 Lembaga**	**46.632.073**	**1 Lembaga**	**50.045.280**	**1 Lembaga**	**140.206.510**	2	08	04	2.02	1	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Keluaran**	**Lembaga keluarga yang dibina**	**1 Lembaga**	**1 Lembaga**	**43.529.158,00**	**1 Lembaga**	**46.632.073**	**1 Lembaga**	**50.045.280**	**1 Lembaga**	**140.206.511**	
								Hasil	**Meningkatnya layanan keluarga**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**									**Hasil**	**Meningkatnya layanan keluarga**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**	
		2	08	04	2.02	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	1 lembaga	31.029.157	1 Lembaga	34.132.073	1 lembaga	37.545.280	1 lembaga	102.706.510	2	08	04	2.02	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	1 lembaga	31.029.158,00	1 Lembaga	34.132.073	1 lembaga	37.545.280	1 lembaga	102.706.511	
		2	08	04	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	keluaran	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	25 orang	12.500.000	25 orang	12.500.000	25 orang	12.500.000	25 orang	37.500.000	2	08	04	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	keluaran	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	25 orang	12.500.000,00	25 orang	12.500.000	25 orang	12.500.000	25 orang	37.500.000	
		2	**08**	**05**			**Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**Persentase pemenuhan data sistem informasi gender dan anak (SIGA)**		**55,80%**	**65%**	**48.637.842**	**70%**	**53.501.626**	**75%**	**58.851.789**	**75%**	**160.991.257**	**2**	**08**	**05**			**Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**Persentase pemenuhan data sistem informasi gender dan anak (SIGA)**		**55,80%**	**65%**	**48.637.842,00**	**70%**	**53.501.626**	**75%**	**58.851.789**	**75%**	**160.991.257**	
		2	08	05	2.01		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Keluaran**	**Tersedianya data gender dan anak**	**1 Dok**	**1 Dok**	**48.637.842**	**1 Dok**	**53.501.626**	**1 Dok**	**58.851.789**	**3 Dok**	**160.991.257**	2	08	05	2.01		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Keluaran**	**Tersedianya data gender dan anak**	**1 Dok**	**1 Dok**	**48.637.842,00**	**1 Dok**	**53.501.626**	**1 Dok**	**58.851.789**	**3 Dok**	**160.991.257**	
								Hasil	**Data terpilah gender dan anak yang akurat**	**80%**	**80%**		**80%**		**80%**		**80%**									**Hasil**	**Data terpilah gender dan anak yang akurat**	**80%**	**80%**		**80%**		**80%**		**80%**	
		2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	1 Dok	1 Dok	48.637.842	1 Dok	53.501.626	1 Dok	58.851.789	3 dok	160.991.257	2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	1 Dok	1 Dok	48.637.842,00	1 Dok	53.501.626	1 Dok	58.851.789	3 dok	160.991.257	
1.3. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan								Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak		3,25	3,20		3,18		3,16		3,16	-								Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak		3,25	3,20		3,18		3,16		3,16	-	
	1.3.1 Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan							Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak		3,25	3,20		3,18		3,16		3,16	-								Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak		3,25	3,20		3,18		3,16		3,16	-	
		2	**08**	**06**			**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Status Kabupaten Layak Anak (KLA)**		**Pratama**	**Madya**	**437.000.000**	**Madya**	**480.700.000**	**Madya**	**528.770.000**	**Madya**	**1.446.470.000**	**2**	**08**	**06**			**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Status Kabupaten Layak Anak (KLA)**		**Pratama**	**Madya**	**437.000.000,00**	**Madya**	**480.700.000**	**Madya**	**528.770.000**	**Madya**	**1.446.470.000**	
		2	08	06	2.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Keluaran**	**Tercapainya peningkatan status KLA**	**Pratama**	**Madya**	**52.000.000**	**Madya**	**57.200.000**	**Madya**	**62.920.000**	**Madya**	**172.120.000**	2	08	06	2.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Keluaran**	**Tercapainya peningkatan status KLA**	**Pratama**	**Madya**	**52.000.000,00**	**Madya**	**57.200.000**	**Madya**	**62.920.000**	**Madya**	**172.120.000**	
								Hasil	**Meningkatnya perlindungan terhadap anak**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**									**Hasil**	**Meningkatnya perlindungan terhadap anak**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**	
		2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	1 Dok	1 Dok	52.000.000	1 Dok	57.200.000	1 Dok	62.920.000	3 Dok	172.120.000	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	1 Dok	1 Dok	52.000.000,00	1 Dok	57.200.000	1 Dok	62.920.000	3 Dok	172.120.000	
		2	08	06	2.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia**	**Keluaran**	**Terfasilitasinya forum anak Kabupaten Belitung**	**1 Dok**	**1 Dok**	**385.000.000**	**1 Dok**	**423.500.000**	**1 Dok**	**465.850.000**	**1 Dok**	**1.274.350.000**	2	08	06	2.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia**	**Keluaran**	**Terfasilitasinya forum anak Kabupaten Belitung**	**1 Dok**	**1 Dok**	**385.000.000,00**	**1 Dok**	**423.500.000**	**1 Dok**	**465.850.000**	**1 Dok**	**1.274.350.000**	

Tujuan	Sasaran	Sebelum Perubahan (Kepmendagri 900-1317 Tahun 2023)																		Setelah Perubahan (Kepmendagri 900-3406 Tahun 2024)																		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab
		Kode					Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Kode					Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		
											Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp										Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	
							Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Hasil**	**Meningkatnya layanan terhadap anak**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**								**Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Hasil**	**Meningkatnya layanan terhadap anak**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
		2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	110.000.000	1 Dok	121.000.000	1 Dok	133.100.000	3 Dok	364.100.000	2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	110.000.000,00	1 Dok	121.000.000	1 Dok	133.100.000	3 Dok	364.100.000	
		2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring lembaga antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dok	1 Dok	275.000.000	1 Dok	302.500.000	1 Dok	332.750.000	2 Dok	910.250.000	2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring lembaga antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dok	1 Dok	275.000.000,00	1 Dok	302.500.000	1 Dok	332.750.000	2 Dok	910.250.000	
		2	**08**	**07**			**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten**		**100%**	**100%**	**52.400.000**	**100%**	**60.640.000**	**100%**	**63.704.000**	**100%**	**176.744.000**	**2**	**08**	**07**			**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten**		**100%**	**100%**	**52.400.000,00**	**100%**	**60.640.000**	**100%**	**63.704.000**	**100%**	**176.744.000**	
																			2	08	07	2.01		**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah**	**Keluaran**	**Tersedianya layanan dan SDM dalam pencegahan KTA**		**100%**	**5.000.000,00**	**100%**	**6.000.000**	**100%**	**7.000.000**	**100%**	**18.000.000**	
																									Hasil	**Meningkatnya Layanan dan SDM dalam Pencegahan KTA**		**100%**								
																			2	08	07	2.02	0004	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/ Program/ Kegiatan Pencegahan KTA	Keluaran	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan/ pencegahan KTA		510 Orang	5.000.000,00	510 Orang	6.000.000	510 Orang	7.000.000	1530 orang	18.000.000	DAK NF PPA
		2	08	07	2.02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Keluaran**	**Tersedianya layanan perlindungan khusus anak tingkat Desa/ Kelurahan**	**NA**	**100%**	**7.400.000**	**100%**	**8.140.000**	**100%**	**8.954.000**	**100%**	**24.494.000**	2	08	07	2.02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Keluaran**	**Tersedianya layanan perlindungan khusus anak tingkat Desa/ Kelurahan**	**NA**	**100%**	**7.400.000,00**	**100%**	**8.140.000**	**100%**	**8.954.000**	**100%**	**24.494.000**	
								Hasil	**Meningkatnya layanan perlindungan khusus anak tingkat Desa/ Kelurahan**	**NA**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**									**Hasil**	**Meningkatnya layanan perlindungan khusus anak tingkat Desa/ Kelurahan**	**NA**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
		2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Keluaran	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	NA	5 Orang	7.400.000					5 Orang	7.400.000	2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Keluaran	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	NA	5 Orang	7.400.000,00					5 Orang	7.400.000	
		2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Keluaran	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	NA			4 Layanan	8.140.000	3 Layanan	8.954.000	7 Layanan	17.094.000	2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Keluaran	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	NA			4 Layanan	8.140.000	3 Layanan	8.954.000	7 Layanan	17.094.000	
		2	08	07	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Keluaran**	**Tersedianya layanan perlindungan anak tingkat Desa/ Kelurahan**	**NA**	**100%**	**45.000.000**	**100%**	**52.500.000**	**100%**	**54.750.000**	**100%**	**152.250.000**	2	08	07	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Keluaran**	**Tersedianya layanan perlindungan anak tingkat Desa/ Kelurahan**	**NA**	**100%**	**40.000.000,00**	**100%**	**46.500.000**	**100%**	**47.750.000**	**100%**	**134.250.000**	
								Hasil	**Meningkatnya layanan perlindungan anak tingkat Desa/ Kelurahan**	**NA**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**									**Hasil**	**Meningkatnya layanan perlindungan anak tingkat Desa/ Kelurahan**	**NA**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
		2	08	07	2.03	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Keluaran	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	NA	1 Keg	45.000.000	1 Keg	52.500.000	1 Keg	54.750.000	3 Keg	152.250.000	2	08	07	2.03	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Keluaran	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	NA	1 Keg	35.000.000,00	1 Keg	40.500.000	1 Keg	40.750.000	3 Keg	116.250.000	
																			2	08	07	2.03	0006	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran	Jumlah SDM Penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK		48 Orang	5.000.000,00	48 Orang	6.000.000	48 Orang	7.000.000	48 Orang	18.000.000	DAK NF PPA
		Total										**27.355.953.837**		**15.362.165.644**		**14.692.599.193**		**57.410.718.674**							**Total**					**27.355.953.838,00**		**15.362.165.644**		**14.692.599.193**		**57.410.718.675**	
										RPD		27.355.953.837		15.362.165.644		14.692.599.193		57.410.718.674									RPD		27.355.953.838,00		15.362.165.644		14.692.599.193		57.410.718.675	
										SELISIH		-		-		-		-									SELISIH		-		-		-		-	